

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA/
THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2018 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Beserta Laporan Auditor Independen/
*Financial Statements as of December 31, 2018 and
For The Year Then Ended
With Independent Auditor's Report*

DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

	<u>Halaman/Page</u>	
Laporan Auditor Independen	1 - 2	<i>Independent Auditor's Report</i>
Neraca	1	<i>Balance Sheet</i>
Laporan Realisasi Anggaran	2	<i>Statement Of Budget Realization</i>
Laporan Operasional	3	<i>Statement Of Operation</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	4	<i>Statement Of Change in Equity</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	5 - 51	<i>Notes To The Financial Statements</i>



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210
Telp. (021) 25549000, Fax. (021) 5720909

SURAT PERNYATAAN SEKRETARIS JENDERAL
THE SECRETARY-GENERAL STATEMENT

TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018

THE RESPONSIBILITY FOR
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2018

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahtiar Arif
Alamat kantor : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 31,
Jakarta Pusat 10210
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

The undersigned:

Name : Bahtiar Arif
Office Address : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 31,
Jakarta Pusat 10210
Job Title : Secretary General
of The Audit Board of
The Republic of Indonesia

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
2. Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material terhadap laporan keuangan;
4. Kami bertanggung jawab atas kepatuhan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of financial statement of The Audit Board of The Republic of Indonesia;
2. Financial Statement of The Audit Board of The Republic of Indonesia have been prepared and presented in accordance with Government Accounting Standards in Indonesia.
3. a. All information have been fully and correctly disclosed in financial statements of The Audit Board of The Republic of Indonesia.
b. The Financial Statements of The Audit Board of The Republic of Indonesia do not contain misleading information or material facts, and we have not omitted any information or facts that would be material to the financial statements;
4. We are responsible for The Audit Board of The Republic of Indonesia compliance to the regulations and internal control.

This statement is confirmed to the best of our knowledge and belief.

Jakarta,
10 Mei 2019/May 10, 2019



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00020/2.1229/AU.1/11/0360-1/1/V/2019

Kepada Yang Terhormat:

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI,
dan
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

No. 00020/2.1229/AU.1/11/0360-1/1/V/2019

To the Honorable:

Chairman of The House of Representatives of
The Republic of Indonesia, and
Chairman of The Audit Board of
The Republic of Indonesia

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA/
THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terlampir, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2018, serta laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas.

We have audited the accompanying financial statement of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI), which comprise the balance sheet as of December 31, 2018, and the statement of budget realization, statement of operation, and statement of changes in equity for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Government Accounting Standards in Indonesia, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and State Auditing Standards issued by the Audit Board of the Republic of Indonesia. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.

Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan dasar bagi opini kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tanggal 31 Desember 2018, realisasi anggaran serta kinerja keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Audit Board of the Republic of Indonesia as of December 31, 2018, budget realization and financial performance for the year then ended, in accordance with Government Accounting Standards in Indonesia.

Hal lain

Laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut dalam laporannya No. LAI/GA/HA/18018 tanggal 18 Mei 2018.

Other matter

The financial statement of the Audit Board of the Republic of Indonesia as of December 31, 2017 and for the year then ended were audited by another independent auditor who expressed an unmodified opinion on those statements No. LAI/GA/HA/18018 dated May 18, 2018.

Laporan atas ketentuan peraturan perundang-undangan

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern kami sampaikan dalam laporan secara terpisah kepada manajemen dengan laporan kami No. 00021/2.1229/AU.1/11/0360-1/1/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 dan No. 00022/2.1229/AU.1/11/0360-1/1/V/2019 tanggal 10 Mei 2019.

Report on other legal and regulatory requirement

Compliance with Laws and Regulations and the Internal Control we submitted in separate reports to the management with our report No. 00021/2.1229/AU.1/11/0360-1/1/V/2019 dated May 10, 2019 and No. 00022/2.1229/AU.1/11/0360-1/1/V/2019 dated May 10, 2019.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
WISNU KARSONO SOEWITO & REKAN
Ijin Usaha No. KEP - 586/KM.1/2018**



Drs. Wisnu B. Soewito, CPA
Nomor Register Akuntan Publik: AP. 0360 /
Public Accountant Registration Number: AP. 0360

**Jakarta, 10 Mei 2019/
Jakarta, May 10, 2019**

SOHO Pancoran, Splendor Wings 16th Floor Unit S-1612
Jl. MT. Haryono Kav. 2-3, Pancoran, Jakarta 12810 - Indonesia

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NERACA**
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

**THE AUDIT BOARD OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
BALANCE SHEET**
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December 31		
		2018	2017	
ASET				ASSETS
Aset Lancar	5.5.a			Current Assets
Kas Lainnya dan Setara Kas	5.5.a.1, 8	43,223,870,642	4,198,123,779	Other Cash and Cash Equivalent
Belanja Dibayar di Muka	5.5.a.2, 9	8,081,642,144	357,453,807	Prepaid Expenditure
Piutang Bukan Pajak	5.5.a.3, 10	616,722,457	3,626,968,686	Non-Taxable Receivable
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	5.5.a.4, 11	(79,594,140)	(25,439,867)	Allowance for doubtful-Non-Taxable Receivable
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	5.5.a.5, 12	106,226,996	41,446,296	Current Portion of Indemnification Claim - net
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar				Allowance for doubtful - Current portion
Tagihan TP/TGR	5.5.a, 13	(13,919,051)	(13,595,148)	Indemnification Claim
Persediaan	5.5.a.6, 14	15,843,612,528	15,887,954,266	Inventories
Jumlah Aset Lancar		67,778,561,576	24,072,911,819	Total Current Assets
Aset Tetap	5.5.b, 5.5.c, 15			Fixed Assets
Tanah	5.5.b	1,989,704,672,051	1,857,964,547,083	Land
Peralatan dan Mesin	5.5.b	1,971,544,524,387	1,961,947,628,280	Equipment and Machinery
Gedung dan Bangunan	5.5.b	2,332,971,508,643	2,325,635,127,982	Building and Properties
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.b	352,549,239,113	352,210,045,652	Road, Irrigation, and Transmission Network
Aset Tetap Lainnya	5.5.b	24,329,110,328	23,870,580,607	Other Fixed Assets
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.5.b	18,925,965,286	17,328,422,600	Construction in Progress
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.5.c	(2,163,812,348,922)	(1,970,430,385,561)	Accumulated Depreciation
Jumlah Aset Tetap		4,526,212,670,886	4,568,525,966,643	Total Fixed Assets
Piutang Jangka Panjang	5.5.d, 16			Long-term Receivables
Tagihan TP/ TGR		3,196,262,033	2,908,215,990	Indemnification Claim
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR	16	(2,696,178,366)	(2,523,276,509)	Allowance for doubtful -Indemnification Claim
Jumlah Piutang Jangka Panjang		500,083,667	384,939,481	Total Long-term Receivables
Aset Lainnya	5.5.e, 17			Other Assets
Aset Tak Berwujud	5.5.e, 17	176,965,980,064	186,848,003,424	Intangible Assets
Aset Lain-lain	5.5.e, 17	61,551,373,767	21,421,653,287	Other Assets
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	5.5.e, 17	(169,433,653,980)	(113,443,225,392)	Amortization Others asset
Jumlah Aset Lainnya		69,083,699,851	94,826,431,319	Total Other Assets
JUMLAH ASET		4,663,575,015,980	4,687,810,249,262	TOTAL ASSETS
KEWAJIBAN				LIABILITIES
Kewajiban Jangka Pendek	5.5.f.1, 18			Short-term Liabilities
Utang kepada Pihak Ketiga	5.5.f.1.1, 18	62,537,868,997	60,986,545,027	Account Payable - Third Parties
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	5.5.f.1.2, 18	51,000,000	50,000,000	
Pendapatan Diterima di Muka	5.5.f.1.2, 18	952,515,553	1,075,292,762	Unearned Revenues
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.f.1.2, 18	1,286,850	43,936,941	Other Short-term Liabilities
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		63,542,671,400	62,155,774,730	Total Short-term Liabilities
JUMLAH KEWAJIBAN		63,542,671,400	62,155,774,730	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas	5.5.g, 19	4,600,032,344,580	4,625,654,474,532	Equity
JUMLAH EKUITAS		4,600,032,344,580	4,625,654,474,532	TOTAL EQUITY
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4,663,575,015,980	4,687,810,249,262	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
 31 Desember 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATEMENT OF BUDGET REALIZATION
 FOR THE YEARS ENDED
 December 31, 2018 and 2017
 (Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2018			2017	
		Anggaran/ Budget	Realisasi/ Realization	%	Realisasi/ Realization	
PENDAPATAN	5.1, 6					REVENUES
Penerimaan Negara Bukan Pajak		5,066,345,000	22,776,536,895	449.57	20,126,781,218	Non - Tax Incomes
JUMLAH PENDAPATAN		5,066,345,000	22,776,536,895	449.57	20,126,781,218	TOTAL REVENUES
BELANJA	5.3, 7					EXPENDITURES
Belanja Operasi						Operation Expenditures
Belanja Pegawai	5.3, 7a	1,955,178,389,000	1,935,394,391,927	98.99	1,135,348,569,875	Employee Expenditures
Belanja Barang	5.3, 7b	1,534,727,080,000	1,471,421,078,750	95.88	1,387,394,996,562	Goods Expenditures
Jumlah Belanja Operasi		3,489,905,469,000	3,406,815,470,677	97.62	2,522,743,566,437	Total Operation Expenditures
Belanja Modal	5.3, 7c					Capital Expenditures
Belanja Peralatan dan Mesin		76,257,943,000	75,898,155,732	99.53	97,211,346,745	Equipment and Machinery Expenditures
Belanja Gedung dan Bangunan		49,220,558,000	48,935,737,016	99.42	41,483,835,707	Building and Property Expenditures
Belanja Modal lainnya		12,036,874,000	11,947,405,588	99.26	9,119,397,227	Other Capital Expenditures
Jumlah Belanja Modal		137,515,375,000	136,781,298,336	99.47	147,814,579,679	Total Capital Expenditures
JUMLAH BELANJA		3,627,420,844,000	3,543,596,769,013	97.69	2,670,558,146,116	TOTAL EXPENDITURES

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)**

**THE AUDIT BOARD OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATEMENT OF OPERATION
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/December 31		
		2018	2017	
KEGIATAN OPERASIONAL				OPERATIONAL ACTIVITIES
PENDAPATAN				REVENUES
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.2, 20	10,883,517,537	9,601,183,174	Non-Tax State Revenues
Jumlah Pendapatan		10,883,517,537	9,601,183,174	Total Revenues
BEBAN				EXPENSES
Beban Pegawai	5.4, 21	1,898,605,355,140	1,135,903,888,607	Employee Expenses
Beban Persediaan	5.4, 22	42,926,327,856	44,885,161,713	Supply Expenses
Beban Barang dan Jasa	5.4, 23	559,262,346,818	524,530,050,727	Goods and services Expenses
Beban Pemeliharaan	5.4, 24	122,437,497,203	116,006,111,465	Maintenance Expenses
Beban Perjalanan Dinas	5.4, 25	758,439,065,324	707,025,084,677	Official Travel Expenses
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4, 26	279,332,025,540	294,089,078,296	Depreciation and Amortization Expenses
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	5.4, 27	227,370,583	49,773,061	Allowance for doubtful Expenses
Jumlah Beban		3,661,229,988,464	2,822,489,148,546	Total Expenses
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional		(3,650,346,470,927)	(2,812,887,965,372)	Surplus/(Defisit) of Operational Activities
KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4, 28			NON OPERATIONAL ACTIVITIES
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(661,145,548)	166,730,126	Surplus/(Defisit) of Disposal of Noncurrent Assets
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		878,885,090	1,216,163,233	Surplus/(Defisit) of Other Non-operation Activities
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		217,739,542	1,382,893,359	SURPLUS/(DEFISIT) OF NON OPERATIONAL ACTIVITIES
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(3,650,128,731,385)	(2,811,505,072,013)	SURPLUS/(DEFISIT) BEFORE EXTRAORDINARY ITEMS
POS LUAR BIASA				EXTRAORDINARY ITEMS
Pendapatan Luar Biasa		-	-	Extra Ordinary Revenues
Beban Luar Biasa		-	-	Extra Ordinary Expenses
SURPLUS/(DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL		(3,650,128,731,385)	(2,811,505,072,013)	SURPLUS/(DEFICIT) OF STATEMENT OF OPERATIONS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
 31 Desember 2018 dan 2017
 (Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
 FOR THE YEARS ENDED
 December 31, 2018 and 2017
 (Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2018	2017	
EKUITAS AWAL	5.5.g. 29	4,625,654,474,532	4,647,887,059,586	BEGINNING BALANCE OF EQUITY
SURPLUS/(DEFISIT) LO	5.5.g. 29	(3,650,128,731,385)	(2,811,505,072,013)	SURPLUS/(DEFISIT) SO
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN				ADJUSTMENT VALUE CURRENT YEAR
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN				CUMULATIVE IMPACT OF CHANGES IN POLICY/
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	5.5.g. 29	85,314,948,224	126,563,338,008	FUNDAMENTAL ERRORS
Koreksi Nilai Persediaan		1,704,000	-	Correction Value Inventory
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		82,539,005,092	66,961,056,291	Correction Value Asset Non Revaluation
Lain-lain		2,774,239,132	59,602,281,717	Others
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	5.5.g. 29	3,539,191,653,209	2,662,709,148,951	TRANSACTION BETWEEN ENTITIES
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(25,622,129,952)	(22,232,585,054)	SURPLUS/(DEFICIT) OF EQUITY
EKUITAS AKHIR		4,600,032,344,580	4,625,654,474,532	ENDING BALANCE OF EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

1. Umum

a. Pendirian

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ("BPK RI") berdiri di Magelang pada tanggal 28 Desember 1946 berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 11/OEM dan mulai bekerja pada tanggal 1 Januari 1947. Dalam kondisi revolusi, kantor BPK RI menumpang dan berpindah-pindah. Terakhir menempati gedung di Jalan Tugu No. 2 Yogyakarta.

Dengan dibentuknya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), dibentuk Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan Konstitusi RIS. Kemudian dengan berdirinya Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950), maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan Republik Indonesia yang merupakan gabungan dari Dewan Pengawas Keuangan RIS di Bogor dan BPK RI di Yogyakarta. Keadaan ini berlangsung sampai dengan tahun 1959.

Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden RI pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), maka sesuai ketentuan UUD 1945 pasal 23 ayat 5, nama Dewan Pengawas Keuangan kembali menjadi BPK RI. Selama periode ini, Pemerintah Indonesia dan BPK RI berusaha sekuatnya untuk mewujudkan Undang-Undang tentang BPK RI sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 23 ayat 5. Sementara itu telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 7 Tahun 1963 dan Perppu No. 6 Tahun 1964 tentang BPK Gaya Baru.

BPK RI sendiri telah berusaha membahas Perppu No. 6 Tahun 1964 untuk menjadikannya sebagai Undang-Undang, yaitu dengan menyusun konsep Rancangan Undang-Undang tentang BPK RI, yang kemudian setelah diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 1965. Dengan begitu, BPK RI berubah menjadi BPK Gaya Baru yang berada di bawah Presiden/Pemimpin Besar Revolusi. Namun kemudian dengan ketetapan MPRS No. X/MPRS 1966, tanggal 5 Juli 1966, kedudukannya dikembalikan pada posisi dan fungsinya sesuai dengan yang diatur dalam UUD 1945.

Pada tahun 1973 dikeluarkan Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1973 tentang BPK RI, yang mengganti dan mencabut UU No. 17 Tahun 1965. Pada tahun 2006, UU No. 5 Tahun 1973 tersebut telah diganti dengan UU No. 15 Tahun 2006. UU inilah yang menjadi dasar keberadaan BPK RI saat ini.

1. General

a. Establishment

The Audit Board of the Republic of Indonesia ("BPK RI") was established in Magelang on December 28, 1946 under Governmental Decree No. 11/OEM and started its operations on January 1, 1947. During the revolution, BPK RI shared its office with other offices and constantly moving from one place to another. The last building used as office was on Jalan Tugu No. 2 Yogyakarta.

Following the establishment of the United States of the Republic of Indonesia (RIS), Financial Supervisory Board was formed under the RIS Constitution. After the establishment of the Republic of Indonesia under the Provisional Constitution of 1950 (UUDS 1950), Financial Supervisory Board of the Republic of Indonesia was established as the consolidation of RIS Financial Supervisory Board in Bogor and BPK RI in Yogyakarta. This condition continued until 1959.

Due to issuance of Presidential Decree on July 5, 1959 declaring the reinstatement of the 1945 Constitution, and in accordance with Article 23 paragraph 5 of the 1945 Constitution, the name 'Financial Supervisory Board' was rechanged into BPK RI. During this period, both the Indonesian Government and BPK RI tried their best to formulate a Law regarding BPK RI that is in accordance with the mandate in Article 23 paragraph 5 of the 1945 Constitution. Meanwhile, Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) No. 7 of 1963 and Perpu No. 6 of 1964 regarding BPK Gaya Baru (New-Style Audit Board) were issued.

BPK RI itself had tried to discuss Perpu No. 6 of 1964 to be stipulated as a Law by formulating a draft of Law regarding BPK RI, which after being filed by the Government to the People's Legislative Assembly (DPR) was approved and ratified as Law No. 17 of 1965. Therefore, BPK RI changed into BPK Gaya Baru under the President/Great Leader of Revolution. Later on, under the Decree of MPRS (Provisional People's Consultative Assembly) No. X/MPRS 1966 dated July 5, 1966, it was reinstated to its position and function as regulated in the 1945 Constitution.

In 1973, Law No. 5 of 1973 regarding BPK RI was issued, substituting and revoking Law No. 17 of 1965. In 2006, Law No. 5 of 1973 was substituted with Law No. 15 of 2006. This Law has become the ground for the existence of BPK RI.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

1. Umum (Lanjutan)

b. Susunan Keanggotaan dan Bentuk Organisasi BPK RI

Anggota BPK RI dipilih oleh DPR dan diresmikan oleh Presiden. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 yang merupakan pengganti UU No. 5 Tahun 1973, BPK RI mempunyai 9 (sembilan) orang anggota yang keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden. Sembilan anggota ini terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang anggota.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 94/P Tahun 2014, Keputusan Presiden RI No. 118/P Tahun 2016, Keputusan Presiden RI No. 47/P Tahun 2017, Keputusan Presiden RI No. 97/P Tahun 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota BPK dan hasil Sidang Anggota BPK tanggal 21 April 2017, susunan Anggota BPK RI pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Ketua :	Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., CPA.
Wakil Ketua :	Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A.
Anggota I :	Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.
Anggota II :	Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., CA.
Anggota III :	Dr. Achsanul Qosasi
Anggota IV :	Prof. Dr. H. Rizal Djalil
Anggota V :	Ir. Isma Yatun, M.T.
Anggota VI :	Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D.
Anggota VII :	Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, S.E., M.M., Ak., CFr.A., CA.

c. Tempat Kedudukan BPK RI

Dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Pemerintah tentang keuangan negara, BPK RI dibantu oleh pelaksana BPK RI. Saat ini, pelaksana BPK RI terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Jenderal, 1 (satu) Badan Diklat PKN, 1 (satu) Inspektorat Utama, 2 (dua) Direktorat Utama, 8 (delapan) Auditorat Utama Keuangan Negara dan 5 (lima) Staf Ahli.

BPK RI Pusat berdomisili di Jalan Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat, dan memiliki Kantor Perwakilan dan Satuan Kerja (satker) sebagai berikut:

- Sekretariat Jenderal BPK RI dan BPK RI Pusat, Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta.
- Badan Diklat PKN BPK RI, Jl. Binawarga II, Jakarta Selatan.
- BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Jl. MT. Haryono Kav. 34, Pancoran, Jakarta Selatan.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Jl. Raya Palka No. 1, Palima, Serang, Banten.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jl. Moh Toha No. 164, Bandung.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 175, Semarang.

1. General (Continued)

b. Board Members and Organizational Structure of BPK RI

Board Members are selected by DPR and are officially ratified by the President. Pursuant to Law No. 15 of 2006, substitute to Law No. 5 of 1973, BPK RI has 9 (nine) members whose membership are officially ratified in a Presidential Decree. These members consist of a chairman concurrently serving as a member, a vice chairman concurrently serving as a member, and 7 (seven) members.

Based on Presidential Decree No. 94/P year 2014, Presidential Decree No. 118/P year 2016, Presidential Decree No. 47/P year 2017, Presidential Decree No. 97/P year 2018 on the Inauguration of Resignation With Respect and Appointment of Member Meeting on April 21, 2017, the board members of BPK RI as of December 31, 2018 consists of the following:

:	Chairman
:	Vice Chairman
:	Board Member I
:	Board Member II
:	Board Member III
:	Board Member IV
:	Board Member V
:	Board Member VI
:	Board Member VII

c. BPK RI Domicile

In conducting state financial management and accountability audit, BPK RI is assisted by implementers. At present, Implementers of BPK RI are Secretariat General, PKN Training Center, Principal Inspectorate, 2 (two) Principal Directorates, 8 (eight) Principal Auditorates and 5 (five) Expert Staffs.

BPK RI Headquarter is located at Jalan (Jl.) Gatot Subroto No. 31, Central Jakarta. BPK RI has Representative Offices and other Working Units (satker) as follows:

- Secretariat General of BPK RI and BPK RI Headquarter, Jl. Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta.
- PKN BPK RI Training Center, Jl. Binawarga II, South Jakarta.
- BPK RI Representative Office in DKI Jakarta, Jl. MT. Haryono Kav. 34, Pancoran, South Jakarta.
- BPK RI Representative Office in Banten, Jl. Raya Palka No. 1, Palima, Serang, Banten.
- BPK RI Representative Office in West Java, Jl. Moh Toha No. 164, Bandung.
- BPK RI Representative Office in Central Java, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 175, Semarang.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

1. Umum (Lanjutan)

c. Tempat Kedudukan BPK RI (Lanjutan)

- BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jl. HOS Cokroaminoto No. 52, Yogyakarta.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jl. Raya Juanda, Sidoarjo, Surabaya.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh, Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jl. Imam Bonjol No. 22, Medan.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 54, Padang.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Jl. Jenderal Sudirman No. 721, Pekanbaru.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Jl. Kartini I No. 29-30 Sekupang, Batam.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Terpadu, Air Itam, Pangkal Pinang.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Jl. P. Hidayat Km 6,5 No. 65, Kel. Sukakarya, Kota Baru, Jambi.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Jl. Pembangunan No. 16, Padang Harapan, Bengkulu.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Jl. Demang Lebar Daun No. 2, Palembang.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B, Sumur Putri, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Jl. D.I. Panjaitan, Renon, Denpasar.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jl. Udayana No. 22, Mataram.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jl. Amabi No. 120, Kupang.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, Jl. Laksdya Leo Wattimena, Passo, Ambon.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Jl. Monomotu No. 12, Ternate.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Jl. Balaikota No. 2, Entrop Jayapura.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, Jl. Sowi Gunung No. 4, Manokwari.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Jl. Pulau Irian No. 12, Tarakan.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jl. Ahmad Yani No. 121, Pontianak.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. Yos Sudarso No. 16, Palangkaraya.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Jl. Moh. Yamin No. 19, Samarinda.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Jl. A Yani km. 32,5, Banjarbaru, Banjarmasin.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Jl. 17 Agustus No. 4, Manado.

1. General (Continued)

c. BPK RI Domicile (Continued)

- *BPK RI Representative Office in Special Region of Yogyakarta, Jl. HOS Cokroaminoto No. 52, Yogyakarta.*
- *BPK RI Representative Office in East Java, Jl. Raya Juanda, Sidoarjo, Surabaya.*
- *BPK RI Representative Office in Aceh, Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh.*
- *BPK RI Representative Office in North Sumatera, Jl. Imam Bonjol No. 22, Medan.*
- *BPK RI Representative Office in West Sumatera, Jl. Khatib Sulaiman No. 54, Padang.*
- *BPK RI Representative Office in Riau, Jl. Jenderal Sudirman No. 721, Pekanbaru.*
- *BPK RI Representative Office in Riau Islands, Jl. Kartini I No. 29 - 30 Sekupang, Batam.*
- *BPK RI Representative Office in Bangka Belitung Islands, Jl. Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Terpadu, Air Itam, Pangkal Pinang.*
- *BPK RI Representative Office in Jambi, Jl. P. Hidayat Km 6,5 No. 65, Kel. Sukakarya, Kota Baru, Jambi.*
- *BPK RI Representative Office in Bengkulu, Jl. Pembangunan No. 16, Padang Harapan, Bengkulu.*
- *BPK RI Representative Office in South Sumatera, Jl. Demang Lebar Daun No. 2, Palembang.*
- *BPK RI Representative Office in Lampung, Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11 B, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.*
- *BPK RI Representative Office in Bali, Jl. D.I. Panjaitan, Renon, Denpasar.*
- *BPK RI Representative Office in West Nusa Tenggara, Jl. Udayana No. 22, Mataram.*
- *BPK RI Representative Office in East Nusa Tenggara, Jl. Amabi No. 120, Kupang.*
- *BPK RI Representative Office in Maluku, Jl. Laksdya Leo Wattimena, Passo, Ambon.*
- *BPK RI Representative Office in North Maluku, Jl. Monomotu No. 12, Ternate.*
- *BPK RI Representative Office in Papua, Jl. Balaikota No. 2, Entrop, Jayapura.*
- *BPK RI Representative Office in West Papua, Jl. Sowi Gunung No. 4, Manokwari.*
- *BPK RI Representative Office in North Kalimantan, Jl. Pulau Irian No. 12, Tarakan.*
- *BPK RI Representative Office in West Kalimantan, Jl. Ahmad Yani No. 121, Pontianak.*
- *BPK RI Representative Office in Central Kalimantan, Jl. Yos Sudarso No. 16, Palangkaraya.*
- *BPK RI Representative Office in East Kalimantan, Jl. Moh. Yamin No. 19, Samarinda.*
- *BPK RI Representative Office in South Kalimantan, Jl. A Yani km. 32,5, Banjarbaru, Banjarmasin.*
- *BPK RI Representative Office in North Sulawesi, Jl. 17 Agustus No. 4, Manado.*

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

1. Umum (Lanjutan)

c. Tempat Kedudukan BPK RI (Lanjutan)

- BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Jl. Tina Loga No. 3, Kota Utara, Gorontalo.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Jl. Prof Moh. Yamin No. 35, Palu.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Jl. H. Abdul Malik Pattana Endeng, Kec. Simboro, Mamuju.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Jl. Sao - Sao No. 10, Kendari.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Jl. Andi Pangeran Pettarani, Makassar.
- Balai Diklat PKN Medan, Jl. Jamin Ginting Km. 10,5 Simpang Selayang, Medan.
- Balai Diklat PKN Yogyakarta, Jl. HOS. Cokroaminoto No. 52, Yogyakarta
- Balai Diklat PKN Gowa, Jl. H. M. Yasin Limpo, Samata-Gowa.
- Museum BPK RI, Jl. P. Diponegoro No. 1 Magelang.

d. Dasar Hukum

Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan BPK RI adalah:

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 Tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat.

1. General (Continued)

c. BPK RI Domicile (Continued)

- *BPK RI Representative Office in Gorontalo, Jl. Tina Loga No. 3, Kota Utara, Gorontalo.*
- *BPK RI Representative Office in Central Sulawesi, Jl. Prof Moh. Yamin No. 35, Palu.*
- *BPK RI Representative Office in West Sulawesi, Jl. H. Abdul Malik Pattana Endeng, Kec. Simboro, Mamuju.*
- *BPK RI Representative Office in Southeast Sulawesi, Jl. Sao - Sao No. 10, Kendari.*
- *BPK RI Representative Office in South Sulawesi, Jl. Andi Pangeran Pettarani, Makassar.*
- *PKN Medan Training Center, Jl. Jamin Ginting Km. 10,5 Simpang Selayang, Medan.*
- *PKN Yogyakarta Training Center, Jl. HOS. Cokroaminoto No. 52, Yogyakarta*
- *PKN Gowa Training Center, Jl. H. M. Yasin Limpo, Samata-Gowa.*
- *BPK RI museum, Jl. P. Diponegoro No. 1 Magelang.*

d. Legal Basis

Laws and regulations serving as the legal basis of BPK RI Financial Statement are as follows:

- *Law No. 17 of 2003 regarding State Finance.*
- *Law No. 1 of 2004 regarding State Treasury.*
- *Law No. 15 of 2006 regarding of the Audit Board of the Republic of Indonesia.*
- *Law No. 15 of 2017 regarding the State Budget for Budget Year 2018.*
- *Government Regulation No. 8 of 2006 regarding the Financial and Performance Reporting for Government Agencies.*
- *Government Regulation No. 71 of 2010 regarding Government Accounting Standards.*
- *Law No. 27 of 2014 regarding regarding Management of State/Regional Property.*
- *Law No. 75 of 2017 regarding Reassessment of State/Regional Property.*
- *Minister of Finance Regulation No. 238/PMK.05/2011 on general guidelines for the Government Accounting System*
- *Minister of Finance Regulation Number 213/PMK.05/2013 as amended by Minister of Finance Regulation Number 215/PMK.05/2016 regarding Amendment to Minister of Finance Regulation Number 213/PMK.05/2013 regarding Central Government Accounting and Financial Reporting Systems.*
- *Minister of Finance Regulation No. 214/PMK.05/2013 regarding of the Standard Chart of Accounts.*
- *Minister of Finance No. 215/PMK.05/2013 About the Journal of Accounting Government On Central Government .*

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

1. Umum (Lanjutan)

d. Dasar Hukum (Lanjutan)

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tatacara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Lembaga.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KM.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

1. General (Continued)

d. Legal Basis (Continued)

- Minister of Finance Regulation Number 219/PMK.05/2013 as amended by Minister of Finance Regulation Number 224/PMK.05/2016 regarding Amendment to Minister of Finance Regulation Number 219/PMK.05/2013 regarding Central Government Accounting Policies.
- Minister of Finance Regulation Number 69/PMK.06/2014 regarding Determination of Accounts Receivable Quality and Allowance for Doubtful Accounts the Formation of the Ministry/Agency and the State Treasurer.
- Minister of Finance Regulation No. 177/PMK.05/2015 on Guidelines for Preparation and Submission of Financial Statements Ministry/Agency as amended by Minister of Finance Regulation Number 222/PMK.05/2016.
- Minister of Finance Regulation Number 251/PMK.06/2015 regarding Procedures for Amortizing State Property in the Form of Intangible Assets at Central Government Entities.
- Regulation of the Minister of Finance Number 181/PMK.06/2016 concerning Administration of State Property.
- Minister of Finance Regulation Number 225/PMK.05/2016 regarding Application of Accrual-Based Government Accounting Standards to Central Government.
- Minister of Finance Regulation Number 65/PMK.06/2017 regarding Depreciation of State Assets in the Form of Fixed Assets at the Central Government.
- Minister of Finance Regulation Number 111/PMK.06/2017 regarding State Property Assessment.
- Minister of Finance Regulation Number 118/PMK.06/2017 regarding Guidelines for Implementing the Reassessment of State Property.
- Minister of Finance Regulation Number 48/PMK.05/2017 regarding Implementation of Liquidation of Accounting Entities and Reporting Entities at the Ministry of Institutions.
- Minister of Finance Decree No. 53/KM.6/2012 regarding Application of State Property Depreciation of Fixed Assets in the Form of the Central Government Entities.
- Minister of Finance Decree No. 59/KM.6/2013 regarding Useful Life Table.
- Minister of Finance Decree Number 94/KM.6/2013 as amended by Minister of Finance Decree Number 145/KM.6/2014 regarding Amendment to Decree of the Minister of Finance Number 94/KM.6/2013 concerning Modules of Depreciation of State Assets in the Form of Fixed Assets in Central Government Entity.
- Minister of Finance Decree No. 620/KM.6/2015 regarding Benefit Period in the Framework of Amortization of State Property in the Form of Intangible Assets at Central Government Entities.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

1. Umum (Lanjutan)

d. Dasar Hukum (Lanjutan)

- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagian Akun Standar.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
- Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2228/PB/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Penggunaan Satker Konsolidasi.
- Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-5240/PB.6/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang Penyelesaian Saldo pada Neraca Satker Konsolidasi 2017.
- Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-9861/PB/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2018.
- Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-182/PB/2018 tanggal 11 Februari 2019 tentang Petunjuk Teknis Koreksi Pencatatan Hasil Penilaian Kembali BMN.

e. Rencana Strategis Tahun 2016 - 2020

Rencana strategis (Renstra) BPK Tahun 2016 - 2020 adalah sebagai berikut:

1. Visi

"Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat".

2. Misi

- a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;
- b. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

1. General (Continued)

d. Legal Basis (Continued)

- Director General of Treasury Regulations No. PER-43/PB/2015 regarding Accounting Guidelines Allowance for Doubtful Accounts at Ministry/Agency.
- Director General of Treasury Regulations No. PER-85/PB/2011 regarding Receivables Administration non-tax Revenues at Unit Ministry/Agency.
- Director General of Treasury Regulations No. KEP-211/PB/2018 on the Account Segment Codefication Standard Chart of Accounts .
- Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 75 of 2017 concerning Reappraisal of State/Regional Property and Minister of Finance Regulation Number 118/PMK.06/2017 concerning Guidelines for Implementing Reassessment of State Property.
- Letter of Director General of Treasury Number S-2228/PB/2017 dated February 28, 2017 concerning Use of Consolidated Working Unit.
- Letter of the Director of Accounting and Financial Reporting of the Ministry of Finance Number S-5240/PB.6/2018 dated July 5, 2018 concerning Balance Settlement on 2017 Consolidated Satker Balance Sheet.
- Letter of Director General of Treasury Number S-9861/PB/2018 dated 28 December 2018 concerning Schedule of Reconciliation, Preparation and Submission of Financial Statements of State Ministries/Institutions (LKKL) in 2018.
- Letter of Director of Accounting and Financial Reporting of the Ministry of Finance Number S-182/PB/2018 dated 11 February 2019 concerning Technical Guidelines for Correction of BMN Reassessment Results.

e. Strategic Plan Year 2016 - 2020

The strategic plan of BPK 2016 - 2020 are as follow:

1. Vision

"Being a supporter of state financial management to achieve state's goal through quality and useful examination".

2. Mission

- a. Examine the management and responsibility of state financial freely and independent;
- b. Execute organizational governmence with integrity, independence and professionalis.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

1. Umum (Lanjutan)

e. Rencana Strategis Tahun 2016 - 2020 (Lanjutan)

3. Tujuan Strategis

Untuk mencapai visi tersebut, BPK menetapkan dua Tujuan Strategis (TS) sebagai berikut:

- a. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara (TS1);
- b. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara (TS2).

4. Sasaran Strategis (SS)

Sebagai bentuk penjabaran tujuan strategis, BPK menetapkan dua sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan (SS1);
- b. Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu (SS2).

5. Indikator Kinerja Utama BPK

Untuk mewujudkan visi dan misi BPK melalui tujuan strategis dan sasaran strategis, ditetapkan ukuran keberhasilan dalam jangka waktu lima tahun yaitu berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Tingkat Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan (IKU1.1.) dengan target indeks capaian 3,50-4,20;
- b. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (IKU1.2.) dengan target capaian 60%-80%;
- c. Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Kalah (IKU2.1.) dengan target capaian 0%;
- d. Indeks Kepuasan *Auditee* Atas Kinerja Pemeriksaan BPK (IKU2.3.) dengan target capaian 3,60-4,00;
- e. Indeks Mutu Organisasi (IKU2.3.) dengan target capaian 3,50-3,90;
- f. Nilai *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi-QARB (IKU2.4.) dengan target capaian A-AA;
- g. Nilai Akuntabilitas Kinerja (IKU2.5.) dengan target capaian A-AA.

1. General (Continued)

e. Strategic Plan Year 2016 - 2020 (Continued)

3. Strategic Goals

To achieve that vision, BPK sets out two Strategic Goals (SG) as follows:

- a. Increase the benefits of inspection results in order to encourage state financial management to achieve the state's goals (SG1);
- b. Improving quality checks in encouraging state financial management to achieve state's goals (SG2).

4. Strategic Target (ST)

As a form of translation of strategic target, BPK establishes two strategic target as follows:

- a. Increased utilization of results by stakeholders (ST1);
- b. Increased of quality control system (ST2).

5. Key Performance Indicators BPK

In order to realize BPK's vision and mission through strategic goals and strategic targets, a five-year success rate is defined as a Key Performance Indicator (KPI) as follows:

- a. Level of Relevance of Examination with Stakeholder Needs and Needs (KPI1.1.) with target achievement index 3,50-4,20;
- b. Percentage of Completion of Follow-up Examination Result (KPI1.2.) with target achievement of 60%-80%;
- c. Percentage of Defined LHP and Defined Loyalty CPC (KPI2.1.) with target achievement of 0%;
- d. Audit Satisfaction Index of Performance of BPK Auditor (KPI2.3.) with target achievement 3,60-4,00;
- e. Organization Quality Index (KPI2.3.) with target achievement of 3,50-3,90;
- f. The Quality Assurance Value of Bureaucracy Reform-QARB (KPI2.4.) with A-AA targets;
- g. Performance Accountability Values (KPI2.5.) with target A-AA achievements.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

1. Umum (Lanjutan)

e. Rencana Strategis Tahun 2016 - 2020 (Lanjutan)

Matriks hubungan antara tujuan strategis, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama yang digunakan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tujuan Strategis/ <i>Strategic Goals</i>	Sasaran Strategis/ <i>Strategic Target</i>	Indikator Kinerja Utama/ <i>Key Performance Indicators</i>
Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara/ <i>Improving the benefits of inspection results in order to encourage the management of state financial to achieve state.</i>	Meningkatkan pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan/ <i>Increased utilization of inspection results by stakeholders .</i>	1. Tingkat Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan/ <i>Relevance Level of Examination with the Hope and Needs of Stakeholders.</i>
		2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ <i>Percentage of Completion of Follow-Up Results of Finding.</i>
Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara/ <i>Improving quality checks in encourage state financial management to achieve country goals.</i>	Meningkatnya kualitas Sistem Pengendalian Mutu/ <i>Increased quality of Quality Control System .</i>	3. Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Kalah/ <i>Percentage of Defined Audit Reports and BPK Labeled Lost .</i>
		4. Indeks Kepuasan Auditee Atas Kinerja Pemeriksa BPK/ <i>Auditee Satisfaction Indeks of Performance of BPK Auditor .</i>
		5. Indeks Mutu Organisasi/ <i>Organization Quality Index.</i>
		6. Nilai Quality Assurance Reformasi Birokrasi-QARB/ <i>The Value of Quality Assurance of Bureaucratic Reform - QARB.</i>
		7. Nilai Akuntabilitas Kinerja/ <i>Performance Accountability Values .</i>

f. Restrukturisasi Program dan Kegiatan BPK

Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan telah menerbitkan Surat Edaran bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No. 0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19 Juni 2009 tentang pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran.

Surat Edaran dimaksud berisi Buku Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran yang digunakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga (termasuk BPK) sebagai pedoman dalam upaya-upaya:

1. Penataan kembali program dan kegiatan (restrukturisasi program dan kegiatan) BPK yang disertai dengan kejelasan sasaran pembangunan, indikator kinerja, dan penanggung jawab program/kegiatan;
2. Penyediaan indikasi kebutuhan pendanaan jangka menengah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan prioritas BPK berdasarkan proyeksi ketersediaan anggaran (*resource envelope*) jangka menengah; dan
3. Pemantapan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran sehingga terdapat keterkaitan yang erat antara perencanaan dan penganggaran sejak penyusunan RPJM dan Renstra BPK hingga penyusunan RKP, Renja BPK, RKA BPK, dan DIPA yang didukung oleh sistem dan informasi (*database*) perencanaan dan penganggaran yang terpadu.

1. General (Continued)

e. Strategic Plan Year 2016 - 2020 (Continued)

The relationship matrix between strategic objectives, strategic target, and key performance indicators used, can be seen in the following table:

f. Restructuring Program And BPK Activities

State Minister for National Development Planning/Head of Bappenas and Minister of Finance has issued Circular Letter with State Minister of PPN/Head of Bappenas and Minister of Finance No. 0142/M.PPN/06/2009 dated June 19, 2009 on guidelines for Planning and Budgeting Reform.

The Circular Letter contains the Planning and Budgeting Reform Manual used by all Ministries/Institutions (including BPK) as a guide in the efforts of:

1. *Reorganization of programs and activities (restructuring programs and activities) of BPK, accompanied by clarity of development targets, performance indicators, and program/activity responsibilities;*
2. *Provision of indications of medium term financing needs to implement priority policies of BPK based on resource envelope of medium term budget; and*
3. *Consolidating the planning and budgeting process until there is a close relationship between planning and budgeting since the preparation of Mid Term Development Plan and Strategic Plan BPK to the preparation of Government Plan, Long Term Plan of BPK, Work Plan Budget BPK and DIPA supported by integrated planning and budgeting system and information.*

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

1. Umum (Lanjutan)

f. Restrukturisasi Program dan Kegiatan BPK (Lanjutan)

Dengan berpedoman pada surat edaran tersebut maka seluruh Kementerian Negara/Lembaga termasuk BPK diminta untuk melakukan restrukturisasi program dan kegiatan, berkoordinasi dengan mitra kerja terkait di Bappenas dan Departemen Keuangan c.q. DJA serta menyampaikan hasil restrukturisasi program dan kegiatan Kementerian/Lembaga kepada Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.

Pada Tahun Anggaran 2018, BPK melakukan restrukturisasi program dan unit organisasi berupa perubahan klasifikasi Unit Organisasi Eselon I pada Bagian Anggaran 004 (BA 004) dari dua Unit Organisasi yaitu Sekretariat Jenderal (BA 004.01) dan BPK Pusat (BA 004.02) menjadi satu Unit Organisasi yaitu Sekretariat Jenderal (BA 004.01).

Sehubungan dengan hal tersebut, pada Tahun Anggaran 2018 BPK telah melakukan likuidasi 35 (tiga puluh lima) Satker di bawah Unit Organisasi Eselon I BPK Pusat (BA 004.02) per tanggal 30 Juni 2018. Selain itu, pada Tahun Anggaran 2018 terdapat satker baru di bawah Unit Organisasi Eselon I Sekretariat Jenderal (BA 004.01) yaitu Museum BPK RI.

Perubahan program/kegiatan BPK pada tahun 2018 dirincikan sebagai berikut:

Program/Kegiatan Lama/ <i>Program/Old Activities</i>	Program/Kegiatan Baru/ <i>Program/New Activities</i>	Pengampu Eselon I/ <i>Supporting Echelon I</i>	Pengampu Eselon II/ <i>Supporting Echelon II</i>
004: Badan Pemeriksa Keuangan	004: Badan Pemeriksa Keuangan		
01: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK/ <i>Management Support Program and Implementation of Other Technical Duties BPK</i>	01: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK/ <i>Management Support Program and Implementation of Other Technical Duties BPK</i>		
1032: Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama Luar Negeri/ <i>Secretarial Service, Public Relation and Cooperation.</i>	1032: Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama Luar Negeri/ <i>Secretarial Service, Public Relation and Cooperation.</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>Secretariat General</i>	Biro Hubungan Masyarakat dan kerja Sama Internasional (Biro Humas dan KSI), Biro Sekretariat Pimpinan dan Museum BPK RI/ <i>Bureau of Public Relations and International Cooperation (Bureau of Public Relations and KSI), Secretariat Bureau of the Chair and Museum of the BPK RI</i>
1033: Manajemen SDM/ <i>Management of Human Resource</i>	1033: Manajemen SDM/ <i>Management of Human Resource</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>Secretariat General</i>	Biro Sumber Daya Manusia (SDM)/ <i>Bureau of Human Resource</i>

1. General (Continued)

f. Restructuring Program And BPK Activities (Continued)

Based on circular letter, all State Ministries/Institutions including BPK are required to restructure programs and activities, coordinate with relevant partners in Bappenas and Ministry of Finance c.q. DJA and submit the results of the restructuring of programs and activities of Ministries/Institutions to the State Minister for National Development Planning/Head of Bappenas and the Minister of Finance.

In Fiscal Year 2018, the BPK restructures programs and organizational units in the form of changing the classification of Echelon I Organizational Units in Budget Section 004 (BA 004) from two Organizational Units namely the General Secretariat (BA 004.01) and Central BPK (BA 004.02) into one Organizational Unit namely Secretariat General (BA 004.01).

In this regard, in the Fiscal Year 2018 the BPK has liquidated 35 (thirty five) Working Units under the Echelon I Central BPK (BA 004.02) as of June 30, 2018. In addition, in the 2018 Budget Year there is a new working unit under the Echelon I Organizational Unit General Secretariat (BA 004.01) namely the Republic of Indonesia BPK Museum.

Changes in the BPK program/activities in 2018 are detailed as follows:

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

f. Restrukturisasi Program dan Kegiatan BPK (Lanjutan)

f. Restructuring Program And BPK Activities (Continued)

Program/Kegiatan Lama/ <i>Program/Old Activities</i>	Program/Kegiatan Baru/ <i>Program/New Activities</i>	Pengampu Eselon I/ <i>Supporting Echeclon I</i>	Pengampu Eselon II/ <i>Supporting Echeclon II</i>
1034: Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara/ <i>Management and Accountability of State Finance</i>	1034: Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara/ <i>Management and Accountability of State Finance</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>Secretariat General</i>	Biro Keuangan/ <i>Bureau of Financial</i>
-	1152: Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum/ <i>Management of Facilities and Infrastructure and Public Service</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>Secretariat General</i>	Biro Umum dan Biro Teknologi Informasi/ <i>Bureau of Public and Bureau of Information Technology</i>
5644: Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara/ <i>Education and Training State Finance Audit</i>	5644: Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara/ <i>Education and Training State Finance Audit</i>	Badan Diklat PKN/ <i>PKN Training Agency</i>	Badan Diklat PKN dan Balai Diklat PKN/ <i>PKN Training Agency and PKN Training Center</i>
02: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Aparatur BPK RI/ <i>Improvement Facilities and Infrastructure Apparatus BPK RI Program</i>	-		
1035: Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum/ <i>Management of Facilities and Infrastructure and Public Service</i>	-		
03: Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK RI/ <i>Management Support and Implementation of Other Technical Duties BPK RI Program</i>	-		
1036: Pengawasan oleh Inspektorat/ <i>Supervision by Inspectorate</i>	-		
06: Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah. Pengembangan dan Pelayanan Hukum di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara/ <i>Registry/Loss Program of State/Local Disadvantages. Development and Legal Service in the State Audit Sector</i>	-		
1037: Pelayanan Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah/ <i>Legal Consultation Service and Registrar of State/Regional Disadvantages</i>	-		
1038: Pelayanan Legalisasi, Analisis dan Bantuan Hukum/ <i>Legislation, Legal Analysis and Assistance Service</i>	-		
07: Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara/ <i>Institutional Quality Improvement, Apparatus and Audit of State Finance Program</i>	-		

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

f. Restrukturisasi Program dan Kegiatan BPK (Lanjutan)

f. Restructuring Program And BPK Activities (Continued)

Program/Kegiatan Lama/ Program/Old Activities	Program/Kegiatan Baru/ Program/New Activities	Pengampu Eselon I/ Supporting Echeclon I	Pengampu Eselon II/ Supporting Echeclon II
1039: Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja/ <i>Strategic Planning and Performance Management</i>	-		
1040: Pengevaluasian dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan/ <i>Evaluation and Reporting of Inspection Result</i>	-		
1041: Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara/ <i>Research and Development of State Finance Audit</i>	-		
08: Program Pemeriksaan Keuangan Negara/ <i>State Finance Auditing Program</i>	08: Program Pemeriksaan Keuangan Negara/ <i>State Finance Auditing Program</i>		
1043: Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/ <i>State Finance Audit and Monitoring of State Losses</i>	1043: Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/ <i>State Finance Audit and Monitoring of State Losses</i>	AKN I-VII, Auditorat Utama Investigasi, dan Staf Ahli/AKN I-VII, Auditorat Utama Investigasi, dan Staf	- Auditorat pada AKN I-VII dan AUI/Auditorat pada AKN I-VII dan BPK Perwakilan/ <i>BPK Representative</i>
-	1153: Pengawasan oleh Inspektorat/ <i>Control by Inspectorate</i>	Inspektorat Utama/ <i>Main Inspectorate</i>	Inspektorat PIMK, PKMP dan PI/Inspektorat PIMK, PKMP dan PI
-	1154: Pelayanan Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah/ <i>Legal Consultation Services and Courtesy of State Losses</i>	Ditama Bingbangkum/ <i>Ditama Bingbangkum</i>	Direktorat KHK/ <i>KHK Directorate</i>
-	1155: Pelayanan Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum/ <i>Development Legislation Services and Legal Aid Services</i>	Ditama Bingbangkum/ <i>Ditama Bingbangkum</i>	Direktorat LPBH/ <i>LPBH Directorate</i>
-	1156: Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja/ <i>Strategic Planning and Performance Management</i>	Ditama Revbang/ <i>Ditama Revbang</i>	Direktorat PSMK/ <i>PSMK Directorate</i>
-	1157: Pengevaluasian dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan/ <i>Evaluating dan Reporting Audit Result</i>	Ditama Revbang/ <i>Ditama Revbang</i>	Direktorat EPP/ <i>EPP Directorate</i>
-	1158: Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara/ <i>Research and Development of State Finance</i>	Ditama Revbang/ <i>Ditama Revbang</i>	Direktorat Litbang/ <i>R & D Directorate</i>
-	1159: Manajemen SDM Pemeriksaan Keuangan Negara/ <i>HR Management Examining State Finance</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>Secretariat General</i>	Biro Sumber Daya Manusia (SDM)/ <i>Bureau of Human Resources Department</i>

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BPK Tahun 2018 ini merupakan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPK (Bagian Anggaran 004). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Akuntansi Instansi terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). SAIBA dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan satuan kerja (satker) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Sedangkan, SIMAK-BMN merupakan sistem akuntansi pendukung yang menghasilkan informasi persediaan, aset tetap, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara.

Dalam penyusunan laporan keuangan tingkat lembaga, BPK sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) melakukan konsolidasi laporan keuangan seluruh satuan kerja (satker) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di lingkungan BPK. Satker-satker tersebut bertanggungjawab dan berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran yang diterimanya.

Satker UAKPA penyusun laporan keuangan di lingkungan BPK berjumlah 77 satker, yaitu terdiri dari:

2. Approach to Develop Financial Statements

Financial Report of BPK in 2018 is a report that covers all financial aspects managed by BPK (Budget Report Section 004). This Financial Statement is generated through Accounting Financial System Institution which is a series of manual and computerized procedures starting from data collection, recording and overview up to the reporting of financial position and financial operation at the State Ministry/Institution.

Institution Accounting System consists of Accounting System of Accrual Based Institution (SAIBA) and Management Information System and Accounting of State Property (SIMAK-State of Goods). SAIBA is designed to produce a unit financial report (unit works) consisting of Statements of Budget Realization, Balance Sheet, Statements Operations, and Statements of Change in Equity. Meanwhile, SIMAK-State of Goods is a supporting accounting system that produces inventory information, fixed assets, and other assets for the preparation of balance sheets and reports on state property.

In the preparation of the institution-level financial statements, BPK as the Budget User Accounting Unit consolidates the financial statements of all unit works (unit works) Unit of Accounting Authorization of Budget User in BPK. The unit work are responsible and obliged to prepare the financial statements for the implementation of the budget they receives.

The Accounting Authorization of Budget User working unit of BPK consists of 77 working unit, consist of:

No.	Nama Satker/Name of Unit Works	KP/ KD	DIPA Eselon I/Echelon I DIPA			Jumlah Satker UAKPA/Total unit works
			Setjen/ SecGen (01)	Pusat/H eadqua rter (02)	Konsol/ Consol (55)	
1.	Sekretariat Jenderal BPK/ <i>Secretariat General of BPK</i>	KP	1	-	-	1
2.	BPK Pusat/ <i>BPK Headquarters</i>	KP	-	1	-	1
3.	Badan Pemeriksa Keuangan Pusat/ <i>BPK Headquarters</i>	KP	1	-	-	1
4.	Badan Pendidikan dan Pelatihan PKN/ <i>Education and Training Center</i>	KP	1	-	-	1
5.	BPK Perwakilan Provinsi Aceh/ <i>BPK Representative of Aceh Province</i>	KD	1	1	-	2
6.	BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara/ <i>BPK Representative of North Sumatera Province</i>	KD	1	1	-	2
7.	BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat/ <i>BPK Representative of West Sumatera Province</i>	KD	1	1	-	2
8.	BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan/ <i>BPK Representative of South Sumatera Province</i>	KD	1	1	-	2
9.	BPK Perwakilan Provinsi Riau/ <i>BPK Representative of Riau Province</i>	KD	1	1	-	2
10.	BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau/ <i>BPK Representative of Riau Islands Province</i>	KD	1	1	-	2
11.	BPK Perwakilan Provinsi Jambi/ <i>BPK Representative of Jambi Province</i>	KD	1	1	-	2
12.	BPK Perwakilan Provinsi Banten/ <i>BPK Representative of Bengkulu Province</i>	KD	1	1	-	2
13.	BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/ <i>BPK Representative of Bangka Belitung Island Province</i>	KD	1	1	-	2
14.	BPK Perwakilan Provinsi Lampung/ <i>BPK Representative of Lampung Province</i>	KD	1	1	-	2
15.	BPK Perwakilan Provinsi Banten/ <i>BPK Representative of Banten Province</i>	KD	1	1	-	2
16.	BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus ibu kota (DKI) Jakarta/ <i>BPK Representative of the Province of Jakarta Capital Special Region (DKI)</i>	KD	1	1	-	2
17.	BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat/ <i>BPK Representative of West Java Province</i>	KD	1	1	-	2
18.	BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/ <i>BPK Representative of Central Java Province</i>	KD	1	1	-	2
19.	BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta/ <i>BPK Representative of Special Province (D.I.) Yogyakarta</i>	KD	1	1	-	2
20.	BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur/ <i>BPK Representative of East Java Province</i>	KD	1	1	-	2
21.	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/ <i>BPK Representative of South Kalimantan Province</i>	KD	1	1	-	2
22.	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur/ <i>BPK Representative of East Kalimantan Province</i>	KD	1	1	-	2
23.	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah/ <i>BPK Representative of Central Kalimantan Province</i>	KD	1	1	-	2
24.	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat/ <i>BPK Representative of West Kalimantan Province</i>	KD	1	1	-	2
25.	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara/ <i>BPK Representative of North Kalimantan Province</i>	KD	1	1	-	2
26.	BPK Perwakilan Provinsi Bali/ <i>BPK Representative of Bali Province</i>	KD	1	1	-	2
27.	BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)/ <i>BPK Representative of West Nusa Tenggara (NTB) Province</i>	KD	1	1	-	2
28.	BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)/ <i>BPK Representative of East Nusa Tenggara (NTT) Province</i>	KD	1	1	-	2
29.	BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara/ <i>BPK Representative of North Sulawesi Province</i>	KD	1	1	-	2
30.	BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah/ <i>BPK Representative of Central Sulawesi Province</i>	KD	1	1	-	2

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)

2. Approach to Develop Financial Statements (Continued)

No.	Nama Satker/Name of Unit Works	KP/ KD	DIPA Eselon I/Echelon I DIPA			Jumlah Satker UAKPA/Total unit works
			Setjen/ SecGen (01)	Pusat/H eadqua rter (02)	Konsol/ Consol (55)	
31.	BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat/BPK Representative of West Sulawesi Province	KD	1	1	-	2
32.	BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/BPK Representative of South Sulawesi Province	KD	1	1	-	2
33.	BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara/BPK Representative of Southeast Sulawesi Province	KD	1	1	-	2
34.	BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo/BPK Representative of Gorontalo Province	KD	1	1	-	2
35.	BPK Perwakilan Provinsi Maluku/BPK Representative of Maluku Province	KD	1	1	-	2
36.	BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara/BPK Representative of North Maluku Province	KD	1	1	-	2
37.	BPK Perwakilan Provinsi Papua/BPK Representative Papua Province	KD	1	1	-	2
38.	BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat/BPK Representative West Papua Province	KD	1	1	-	2
39.	Balai Diklat PKN Medan/Medan Training Center	KD	1	-	-	1
40.	Balai Diklat PKN D.I. Yogyakarta/Yogyakarta Training Center	KD	1	-	-	1
41.	Balai Diklat PKN Gowa/Gowa Training Center	KD	1	-	-	1
42.	Museum BPK RI/BPK RI Museum	KD	1	-	-	1
43.	Konsolidasi BPK RI/BPK RI Consolidation	KP	-	-	1	1
Jumlah/Total			41	35	1	77

Keterangan:

- a. Terdapat perubahan nomenklatur Satker di BPK menyesuaikan perubahan ke empat struktur organisasi berdasarkan Keputusan BPK Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017 dan Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan surat Nomor S-1474/AG/2018 tanggal 31 Juli 2018, yaitu:
 1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) berubah menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badan Diklat PKN).
 2. Balai Diklat Medan berubah menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Balai Diklat PKN) Medan.
 3. Balai Diklat Yogyakarta berubah menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Balai Diklat PKN) Yogyakarta.
 4. Balai Diklat Makassar berubah menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Balai Diklat PKN) Gowa.
 - b. Jumlah 77 (tujuh puluh tujuh) Satker UAKPA tersebut terdiri dari:
 1. 41 (empat puluh satu) Satker aktif pada DIPA Eselon I Setjen yang terdapat pagu dan realisasi belanja pada tahun Tahun Anggaran 2018 di masing-masing Satker tersebut.
 2. 1 (satu) Satker Konsolidasi BPK yang dibentuk berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2228/PB/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang petunjuk penggunaan satker konsolidasi. Satker konsolidasi tersebut dibentuk untuk mengakomodir jurnal take out revaluasi aset tetap pada tahun 2017 dan 2018 sesuai rekomendasi BPK yang berdampak pada seluruh Kementerian/Lembaga di Lingkup LKPP.
 3. 35 (tiga puluh lima) Satker DIPA Eselon I BPK Pusat yang dilikuidasi per 30 Juni 2018 terkait restrukturisasi program dan unit organisasi Tahun Anggaran 2018. Proses Likuidasi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian/Lembaga.
- a. There was a change in nomenclature of the Satker at the BPK adjusting changes to the four organizational structures based on BPK Decree Number 14/K/I-XIII.2/9/2017 and the Ministry of Finance Director General of Budget Letter with letter Number S-1474/AG/2018 July 31 2018, that is:
 1. The Education and Training Center (Pusdiklat) has changed to the State Financial Examination Education and Training Agency (PKN Training Agency).
 2. The Medan Diklat Training turned into the Center for Education and Training of State Financial Examination (PKN Training Center) Medan.
 3. The Yogyakarta Diklat Training Center turned into the Yogyakarta State Financial Examination and Education Center (PKN Training Center).
 4. The Makassar Diklat Center was transformed into the Gowa National Financial Education Training and Education Center (Balai Diklat PKN).
 - b. The total 77 (seventy seven) UAKPA Unit Works consists of:
 1. 41 (forty one) active Working Units in the General Secretariat of the Echelon I DIPA which have ceilings and expenditure realization in the fiscal year 2018 in each of these Working Units.
 2. 1 (one) BPK Consolidation Working Unit formed based on the Director General of Treasury Letter Number S-2228/PB/2017 dated February 28, 2017 concerning instructions for using the consolidated satker. The consolidated Satker was formed to accommodate the take-out journal of fixed asset revaluation in 2017 and 2018 according to BPK recommendations which had an impact on all Ministries/Institutions in the Scope of LKPP.
 3. 35 (thirty five) Working Unit of the Central BPK Echelon I DIPA liquidated per 30 June 2018 related to program restructuring and organizational units in Fiscal Year 2018. The Liquidation Process refers to Minister of Finance Regulation Number 48/PMK.05/2017 concerning the Implementation of Liquidation of Accounting Entities and Entities Reporting to Ministries/Institutions.

3. Basis Akuntansi

Dalam menyusun laporan keuangan, BPK menerapkan basis akrual untuk penyusunan dan penyajian Neraca, LO, dan LPE serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian LRA. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan oleh BPK dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BPK Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPK. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPK adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum LRA Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

3. Accounting Basic

In preparing the financial statements, BPK applies the accrual basis for the preparation and presentation of Balance Sheet, Statement of Operations, and Statement of Changes in Equity as well as cash basis for preparation and presentation of Statement of Budget Realization. The accrual basis is an accounting basis that recognizes the effect of transactions and other events at the time the transactions and events occur, regardless of when cash or cash equivalents are received or paid. While the cash basis is the basis of accounting that recognizes the effect of transactions or other events when cash or cash equivalents are received or paid. This is in accordance with Government Accounting Standards that has been established with Government Regulation No. 71 Year 2010 on Government Accounting Standards.

4. Basic of Measurement

Measurement is the process of determining the value of money to recognize and include each post in the financial statements. The measurement basis applied by BPK in the preparation and presentation of the Financial Statement is by use historical value.

Assets are recorded at the expense/use of economic resources or at fair value of the benefits provided for acquiring the asset. Liabilities are recorded at the fair value of economic resources used by the government to meet the obligations concerned.

Measurement of financial statement items using Indonesia rupiah currency. Transactions using foreign currencies are converted and denominated into Indonesia rupiah.

5. Accounting Policies

Preparation and presentation of BPK Financial Statements Year 2018 have been referred to Government Accounting Standards. The accounting policies are the principles, basics, conventions, rules and specific practices chosen by a reporting entity in the preparation and presentation of financial statements. The accounting policies adopted in these financial statements are the policies established by BPK. In addition, in the preparation has been applied rules of good financial management in the government environment.

The significant accounting policies used in the preparation of the BPK Financial Statements are as follows:

1. Revenues-Statement of Budget Realization

Revenue-Statement of Budget Realization is all General Statement of Budget Realization Cash Account receipts that add more Budget Balance within the relevant fiscal year period to which the government is entitled and is not required to be repaid by the government. Revenue-Statement of Budget Realization is recognized when the cash is received in the State Treasury.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

5. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan-Laporan Operasional (LO)

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPK adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan;
- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan penghapusan atau dokumen lain yang dipersamakan;
- Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara (TP/TGR) diakui saat dikeluarkannya surat keputusan TP/TGR atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Accounting Policies (Continued)

The revenue-SoBR is executed on the basis of gross principle, by recording gross receipts, and not recording the net amount (after being offset). Revenue-Statement of Budget Realization is presented according to the classification of revenue sources.

2. Revenues-Statement of Operational

Revenue-Statement of Operational is a recognized central government right as an equity enhancer within the period of the fiscal year concerned and does not need to be repaid. Revenues-Statement of Operational are recognized when the right to revenue and/or Revenue is realized, ie the inflow of economic resources. In particular the revenue-Statement of Operational recognition to BPK is as follows:

- Training Service Revenue is recognized after the training is completed;*
- Building Rent Revenue is recognized proportionally between the value and the rental period;*
- Fines Income is recognized at the time of issuance of fines or other equivalent documents;*
- Revenues from the alienation of State of Goods shall be recognized upon the issuance of a decree of abolition or other equivalent documents;*
- Revenue Reduction for Losses suffered by the State (Indemnification of Treasury/Claims Bills) is recognized upon the issuance of Indemnification of Treasury/Claims Bills decree or other equivalent documents.*

The accounting revenue-Statement of Operational is carried out on a gross basis, by posting gross receipts, and not recording the net amount (after being offset). Revenue is presented according to the classification of revenue sources.

3. Expenditure

Expenditure is all spending from the State General Treasury Account which reduces the Budget Balance Over within the relevant fiscal year period that the government will not be repaid. Expenditures is recognized when a cash outflow is made from KUN. Specific expenditures through the expenditure treasurer, expenditure recognition occurs when the accountability of such expenditures is authorized by The Office of State Treasury Services. Expenditures are presented by economic classification/type of expenditure and subsequent classifications by organization and function shall be disclosed in the Notes to the Financial Statements.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

5. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

4. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini, meliputi:

1) Kas

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas terdiri atas:

- a) Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Muka dari KPPN yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas yang sumbernya berasal dari Uang Muka dari KPPN yang belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

5. Accounting Policies (Continued)

4. Expenses

Expenses are the decline in economic benefits or potential services in the reporting period that decrease the equity, which may be the expenditure or consumption of assets or the incurrence of liabilities. Expenses are recognized when an obligation arises; asset consumption occurring; the decline in economic benefits or potential services. Expenses are presented under the economic classification/type of expenditure and subsequent classifications by organization and function are disclosed in the Notes to the Financial Statements.

5. Assets

Assets are economic resources that are controlled and/or owned by the government as a result of past events and from which future economic and/or social benefits are expected to be gained, either by the government or by society, and can be measured in units of money, including the non-financial resources necessary for the provision of services to the general public and resources maintained for historical and cultural reasons. In the sense of this asset does not include natural resources such as forests, wealth on the seabed, and mining content. Assets are recognized upon receipt or when ownership rights move.

Assets are classified into Current Assets, Fixed Assets, Long-Term Receivables, and Other Assets.

a. Current Assets

Current Assets include cash and cash equivalents that are expected immediately to be realized, used or owned for sale within 12 (twelve) months from the date of reporting. These current assets, including:

1) Cash

Cash is presented on the balance sheet using the nominal value. Cash in foreign currencies are presented on the balance sheet using the middle rate of BI at the balance sheet date. Cash consists of:

- a) *Cash in the Spending Treasurer is cash that is controlled, managed and under the responsibility of the Spending Treasurer derived from the Remnant Advance from The Office of State Treasury Service which has not been accounted or reimbursed to the State Treasury as of the balance sheet date. Cash in the Spending Treasurer covers all account balances of treasurer of expenditures, coins, notes, and other cash whose source comes from Advance from The Office of State Treasury Service which has not been paid back to the State Treasury as of the balance sheet date.*

5. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

- b) Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari Uang Muka dari KPPN, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai.

Kas Lainnya dan Setara Kas berasal dari:

- Pendapatan yang Belum Disetor
Pendapatan negara yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran pada suatu periode anggaran namun pada akhir tahun anggaran belum disetorkan ke Kas Negara, yaitu berupa pajak, pengembalian belanja perjalanan dinas dan belanja pegawai (honor pegawai, TKPK, gaji), jasa giro, penerimaan PNBP, dan lain-lain yang belum disetorkan.
Khusus untuk Pengembalian Belanja tahun berjalan yang belum disetor, sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-2875/PB.6/2016 tanggal 5 April 2016 menjelaskan bahwa Pengembalian Belanja yang belum disetor diakui sebagai pengurang Beban yang bersangkutan pada periode yang sama.
- Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya
Utang pihak ketiga yang berada pada Bendahara Pengeluaran yaitu berupa honor, gaji/TKPK, uang makan yang belum dibayarkan kepada pegawai, serta uang lainnya yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga lainnya pada tanggal Neraca.
Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya.
- Utang Jangka Pendek Lainnya
Pajak yang dipotong oleh bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan. Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor.

2) Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka berasal dari realisasi belanja tahun pelaporan, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum seluruhnya diterima/dinikmati oleh satuan kerja.

5. Accounting Policies (Continued)

- b) Other Cash and Cash Equivalents include Other Cash in the Spending Treasurer, which is cash which is under the responsibility of the treasurer of expenditures not originating from the Advance from the The Office of State Treasury Service, whether the account balance in the bank or cash balance.

Other Cash and Cash Equivalents come from:

- Unpaid Revenues
State income received by the Expenditure Treasurer in a budget period but at the end of the fiscal year has not been deposited to the State Treasury, there are of taxes, returns on official travel expenses and personnel expenses (salaries, TKPK, salaries), demand deposits, Non-Tax Income receipts, and others that have not been deposited.
Especially for the refund expenditures of the current year which has not been paid yet, pursuant to the letter of the Director General of Treasury No. S-2875/PB.6/2016 dated April 5, 2016 explains that the unpaid Refunds Expenditures are recognized as a deduction for the related Expenses in the same period.
- Debt to Other Third Parties
The third party's payable in the Spending Treasurer is in the form of honorarium, salary/TKPK, unpaid food allowance to the employee, and other unpaid money to other third parties at Balance Sheet period.
Accounting Treatment is on the Asset Current side there are Other Cash and Cash Equivalents in the Spending Treasurer, while in the Short Term Liability there is Debt to Other Third Parties.
- Other Short-Term Debts
Tax with held by the spending Treasurer but not yet paid to the State Treasury up to the date of reporting. Accounting Treatment is on the Asset Current side there are Other Cash and Cash Equivalents in the Spending Treasurer, while in the Short-Term Liabilities there is Unpaid Treasury Payable.

2) Prepaid Expenditures

Prepaid Expenditures are derived from the actual expenditures of the reporting year, but goods/services/facilities from third parties have not been fully received/enjoyed by the unit work.

5. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

Belanja dibayar dimuka berasal dari realisasi belanja barang untuk sewa gedung/bangunan dengan jangka sewa melebihi tahun pelaporan.

Belanja dibayar di Muka untuk masa lebih dari satu tahun tidak perlu dipisahkan sebagai akun tersendiri baik yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun maupun lebih dari 1 (satu) tahun seluruhnya dicatat sebagai aset lancar.

Adapun metode perhitungan Belanja Barang Dibayar Dimuka adalah nilai sewa dibagi dengan jumlah hari masa sewa seluruhnya dikalikan dengan jumlah sisa hari masa sewa yang masih belum digunakan.

3) Piutang Bukan Pajak

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbu berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Piutang berasal dari Piutang Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca.

Akun Piutang Bukan Pajak perlu diidentifikasi apakah masuk dalam kategori Pendapatan Yang Masih Harus Diterima atau Piutang PNPB dengan kebijakan yaitu:

- a) Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNPB yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Kebijakan akuntansi untuk Pendapatan

Yang Masih Harus Diterima yaitu:

- Dasar pengakuan adalah perhitungan akuntansi atau tidak melalui penetapan.
- Dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.
- Tidak dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

BPK tidak mempunyai akun Pendapatan yang Masih Harus Diterima.

- b) Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

- a. Piutang PNPB adalah pendapatan PNPB tahun berjalan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar dan telah timbul hak tagihnya oleh pemerintah (telah jatuh tempo), namun belum diterima pembayarannya. Kebijakan akuntansi untuk Piutang PNPB yaitu:

5. Accounting Policies (Continued)

Prepaid expenditures are derived from the realization of goods expenditures for lease of buildings with the lease term exceeding the reporting year.

Prepaid expenditures for more than one year do not need to be separated as individual accounts with maturities of less than 1 (one) year or more than 1 (one) year entirely recorded as current assets.

The method of calculating Expenditures for Prepaid Goods is the rental value divided by the total number of days of the lease multiplied by the remaining amount of unused rental days.

3) Non Tax - Receivables

Accounts receivable are expressed in the balance sheet according to the value arising under the rights issued by the billing or equivalent letters which are expected to be returned within 12 (twelve) months after the date of reporting.

Receivables are from Non Taxes Received from non-tax state revenues up to the balance sheet date.

Non Tax Account Accounts should be identified whether they clasified into the Unearned Revenue category or Non-Tax Income Receivables with the following policies:

- a) *Unearned Revenue is the revenue of Non-Tax Income based on accounting calculation has become the right of the government but there is no right to collect because it is not yet time to be paid/collected.*

The accounting policies for Unearned Revenue are:

- *The basis for recognition is accounting or not through determination.*
- *A journal is conducted at the beginning of the next period.*
- *Not calculated allowance for Uncollectible Receivable.*

BPK does not have an Unearned Revenue account.

- b) *Non-Tax Receivables are receivables arising from non-tax state revenues that have not been paid until the end of the financial statement period.*

- a. *Non-Tax Income Receivables are Non-Tax Income income for the current year that should have been paid by the obligatory payers and have been collected by the government (due dated) but have not yet received the payment. The accounting policies for Non-Tax Income Receivables are:*

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

5. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

- Dasar pengakuan adalah Surat Tagihan/Surat Penetapan/Yang Dipersamakan.
- Tidak dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.
- Dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

Piutang PNBPN berasal dari Piutang Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri, Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang yang belum dibayar oleh wajib bayar sampai pada tanggal neraca, Kelebihan pembayaran belanja modal karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan (yang dibayar melalui jaminan/Bank Garansi).

- b. Piutang Lainnya berasal dari piutang yang berasal dari selain Piutang Bukan Pajak dan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi misalnya:

- Kelebihan belanja perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan rampung jumlahnya, namun pada tanggal neraca masih belum diselesaikan oleh pelaksana perjalanan dinas, serta
- Kelebihan pembayaran gaji/TKPK kepada pegawai.

Kebijakan akuntansi untuk Piutang Lainnya adalah:

- Tidak dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya melainkan saat penyetoran ke Kas Negara.
- Dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

Sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-2875/PB.6/2016 tanggal 5 April 2016 menjelaskan bahwa Pengembalian Belanja yang belum disetor diakui sebagai pengurang Beban yang bersangkutan pada periode yang sama.

- 4) Piutang disajikan dalam Neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

5. Accounting Policies (Continued)

- The basis for recognition is the Bills/Letter of Establishment/ Equalization.

- No reverse journal was performed at the beginning of the next period.

- The allowance for uncollectible accounts is calculated.

Non-Tax Income receivables are derived from the Office/Home Office Revenue Receipt, Building Revenue, Buildings and Warehouse Unpaid by the obligation to pay up to the balance sheet date, Excess payment of capital expenditures due to late settlement of work (paid by guarantee/Bank Guarantee).

- b. Other Receivables come from accounts receivable from non-taxable receivables and Current Portion of Claims on Compensation for example:

- The excess of official travel expenses that have been accounted for is completed, but at the balance sheet date has not been resolved by the official travel officer, as well as

- Advantages of salary payment/TKPK to employees.

The accounting policies for Other Receivables are as follows:

- No reverse journal was made at the beginning of the next period but at the time of deposit to the State Treasury.
- The allowance for uncollectible accounts is calculated.

In accordance with the letter of Director General of Treasury No. S-2875/PB.6/2016 dated April 5, 2016 explains that the unpaid refunds are recognized as a deduction for the related Expenses during the same period.

- 4) Receivables are presented in the Balance Sheet at a realizable value. This is realized by establishing an allowance for doubtful accounts. The allowance is based on the quality of receivables determined on the basis of maturity and collection efforts by the government. The allowance is as follows:

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

5. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

5. Accounting Policies (Continued)

Kualitas Piutang/ <i>Quality of Receivables</i>	Uraian/Descriptions	Penyisihan/ <i>Allowance</i>
Lancar/ <i>Current</i>	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo/ <i>Not to be repaid until the maturity date</i>	0.50%
Kurang Lancar/ <i>Non Current</i>	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan/ <i>One month commencing from the date of the First Billing Letter not being repaid</i>	10%
Diragukan/ <i>Doubtful</i>	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan/ <i>One month from date of the Second Receipt Letter is not repaid</i>	50%
Macet/ <i>Loss</i>	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan/ <i>One month commencing from the date of the Third Tax Return is not redeemed</i>	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN/ <i>Receivables have been submitted to the State Receivables Management Committee/DJKN</i>	

5) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR.

6) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan dalam kondisi baik yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Dalam menghitung harga pokok produksi, dapat digunakan biaya standar dalam hal perhitungan biaya riil sulit dilakukan;
- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Sesuai dengan kebijakan akuntansi, beban persediaan hanya diperhitungkan untuk persediaan yang sifatnya umum, tidak termasuk persediaan yang berasal dari belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Untuk persediaan yang bersifat umum, beban persediaan tahun berjalan termasuk di dalamnya persediaan yang masih ada di gudang dengan kondisi rusak atau usang. Walaupun secara fisik persediaan masih ada tidak diperhitungkan sebagai saldo persediaan. Apabila saldo persediaan akhir yang sebelum opname fisik nilainya lebih besar dari hasil opname fisik maka dicatat sebagai pengurang Persediaan.

5) *Indemnification of Treasury/Claims which will mature 12 (twelve) months after the balance sheet date is presented as Current Section of Indemnification of Treasury/Claims Bills.*

6) *Inventory is a current asset in the form of goods or equipment in good condition intended to support the government's operational activities, and goods intended to be delivered in service to the public. Inventory Value is recorded based on the result of physical calculation at balance sheet date multiplied by:*

- The last purchase price, when acquired by purchase;*
- The cost of production if obtained by producing itself. In calculating the cost of production, standard cost can be used in terms of real cost calculation is difficult;*
- Fair price or estimated sales value if obtained by other means.*

In accordance with the accounting policy, inventory expenses are only calculated for general inventories, excluding inventories derived from goods purchases to be delivered to the public. For general inventories, the current year's inventory expenses include the remaining inventories in the warehouse with damaged or obsolete conditions. Although physical inventory still exists not counted as inventory balance. If the balance of the ending inventory which prior to the physical opname is greater than that of the physical hospital shall be recorded as a deduction of Inventory.

5. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, pengakuan perolehan aset tetap sejak 2018 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Akibat dari penerapan kebijakan kapitalisasi aset tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.06/2016, data BMN menjadi terbagi dua, yaitu:

- 1) Daftar BMN Intrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan seluruh BMN yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan BMN yang diperoleh melalui transaksi Transfer Masuk/Penerimaan dari pertukaran/Pengalihan Masuk serta BMN yang dipindahbukukan dari Daftar BMN Ekstrakomptabel pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi.
- 2) Daftar BMN Ekstrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Peralatan dan mesin yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002, yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp300.000, dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp1.000.000 serta yang diperoleh dari pengalihan dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan Mesin dengan kategori ini dibukukan dan dilaporkan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Intrakomptabel.

5. Accounting Policies (Continued)

b. Fixed Assets

Fixed assets include all tangible assets utilized by the government or for the benefit of the public with a useful life of more than one year. Fixed assets include land; equipment and machinery; properties and buliding; roads, irrigation, and networks; other fixed assets; as well as Construction in Progress. The value of Property and Equipment is presented at cost or fair value. In accordance with Minister of Finance Regulation No. 181/PMK.06/2016 concerning Administration of BMN, the recognition of acquisition of property, plant and equipment since 2018 is based on the value of the minimum capitalization unit as follows:

- Expenditures of unit of equipment and machinery and sports equipment equal to or more than Rp1,000,000 (one million rupiah);
- Expenditures on Properties and Buliding equal to or more than Rp25,000,000 (twenty five million rupiah);
- Expenditures not covered by the minimum capitalization limits mentioned above are treated as expenses except land, road/irrigation/network expenditures and other fixed assets in the form of library and art-related collections.

As a result of the implementation of the asset capitalization policy, as stated in Regulation of the Minister of Finance No. 181/PMK.06/2016, State of Goods data is divided into two categories:

- 1) List of State of Goods Intracomptables, including State of Goods in the form of fixed assets that meet the capitalization criteria and all State of Goods acquired prior to the enactment of capitalization policies, and State of Goods obtained through Incoming/ Receipt Transfers from Exchange/Inbound Transfer as well as State of Goodss transferred from the List of State of Goods Ekstrakomptabel at the time of accumulated value the cost of acquisition and development value has reached the minimum limit of capitalization.
- 2) List of State of Goods Extracomptables, including State of Goods in the form of fixed assets that do not meet the criteria of capitalization.

Equipment and machinery acquired prior to January 1, 2002, obtained since January 1, 2002 to December 31, 2017 with a minimum unit value of more than or equal to Rp300,000, and obained since January 1, 2018 with a minimum unit value of more than or equal to Rp1.000,000 and derived from the transfer are capitalized as property, plant and equipment. Tools and Machines of this category are recorded and reported in the State of Goods List and Intracomptable State of Goods Report.

5. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

Peralatan dan Mesin yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp300.000 dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp1.000.000 tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan mesin dengan kategori ini dibukukan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Ekstrakomptabel.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002, yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp10.000.000, dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp25.000.000 serta yang diperoleh dari pengalihan dikapitalisasi sebagai aset tetap. Gedung dan Bangunan dengan kategori ini dibukukan dan dilaporkan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Intrakomptabel. Gedung dan Bangunan yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp10.000.000 dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp25.000.000 tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap. Gedung dan Bangunan dengan kategori ini dibukukan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Ekstrakomptabel.

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman.

Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milik dalam kelompok aset tetap. Dalam hal Aset Tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker, maka renovasi tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Renovasi.

Akun Aset Tetap Renovasi di BPK terjadi karena 3 hal, yaitu:

- 1) Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam suatu K/L (BPK).
 Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker Setjen) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja lain (BPK Perwakilan/Badan Diklat PKN/Balai Diklat PKN/Museum BPK).

5. Accounting Policies (Continued)

Equipment and Machinery obtained since January 1, 2002 to December 31, 2017 but the unit value of less than Rp300,000 and obtained since January 1, 2018 but the unit value of less than Rp1,000,000 is not capitalized as fixed assets. Equipment and machines of this category are recorded in the State of Goods List and State of Goods Reports of Extracomptables.

Building and Properties acquired prior to January 1, 2002, obtained since January 1, 2002 to December 31, 2017 with a minimum unit value of more than or equal to Rp10,000,000, and obtained since January 1, 2018 with a minimum unit value of more than or equal to Rp25,000,000 and derived from the transfer are capitalized as property, plant and equipment. Building and Properties of this category are recorded and reported in the State of Goods List and Intracomptable State of Goods Report. Building and Properties obtained since January 1, 2002 to December 31, 2017 but the unit value of less than Rp10,000,000 and obtained since January 1, 2018 but the unit value of less than Rp25,000,000 is not capitalized as fixed assets. Building and Properties of this category are recorded in the State of Goods List and State of Goods Reports of Extracomptables.

Other fixed assets include fixed assets that can not be grouped into groups Land; Equipment and Engineering; Building and Construction; Roads, Irrigation and Networks, acquired and used for the operations of government and in ready to use. The assets included in the category of Other Fixed Assets is a collection of libraries/book and non-book items patterned art/culture, animals, fish, and plants.

Included in the category Other Fixed Assets Fixed Assets Renovation is. Remodeling can be conducted on all belongings in a group of fixed assets. In the case of the fixed assets that meet the capitalization criteria remodeled and does not belong to a work unit, the renovations were recorded as fixed assets renovation.

Accounts Fixed Assets Renovation in BPK occur because of three things:

- 1) Renovation of fixed assets belonging to other work units in a K/L (BPK).
 Carrying out renovation work units (satker Secretariat) not recorded as additions to fixed assets related to the acquisition value of fixed assets such as ownership exist in other work unit (BPK Representative/Pusdiklat BPK).

5. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

2) Renovasi aset tetap milik satuan kerja K/L lain.

Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker BPK) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja K/L lain;

Pada poin 1) dan 2) apabila renovasi tersebut telah selesai pengerjaannya sebelum tanggal pelaporan maka akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi dan disajikan di Neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut masih dalam proses pengerjaan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan (dari kontraktor kepada satker BPK), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

3) Renovasi aset tetap milik Instansi pemerintah lainnya (Pemda) dan renovasi aset tetap milik pihak lain selain pemerintah (Swasta, BUMN/BUMD, Yayasan, dan lain-lain).

Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (Satker BPK) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain.

Apabila renovasi tersebut telah selesai pengerjaannya sebelum tanggal pelaporan maka akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya - Aset Tetap Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut masih dalam proses pengerjaan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan (dari kontraktor kepada satker BPK), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Aset tetap (termasuk Aset Tetap Renovasi) yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aktiva tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan.

5. Accounting Policies (Continued)

2) Renovation of fixed assets belonging to the working unit K/L others.

Carrying out renovation work units (satker BPK) did not record it as an addition to the value of acquisition of fixed assets related to the ownership of the fixed assets is on a working unit K/L others;

At points 1) and 2) when the renovation is complete the process before the reporting date, the assets will be recorded as Other Fixed-Fixed Assets Renovation and presented in the balance sheet as fixed assets group. If up to the reporting date the renovations are still in progress, or completed but not yet handed over the process (of a contractor to satker BPK), it will be recorded as Construction In Work (KDP).

3) Renovation of fixed assets belonging to other government agencies (local government) and the renovation of fixed assets owned by other parties other than the government (private, state/enterprises, foundations, etc.).

Unit works undertaking renovations (BPK unit works) do not record them as additions to the related fixed asset value due to the ownership of such fixed assets to others.

If the renovation has been completed prior to the reporting date it will be recorded as Other Fixed Assets-Renovations and Assets Renovated and presented on the balance sheet as a Group of Property Assets. Up to the date of reporting the renovation is still under construction, or has been completed but not yet handed over (from contractor to BPK), it will be recorded as Construction In Progress.

Fixed assets (including Renewal Assets) terminated from active use of the government do not meet the definition of fixed assets and must be transferred to Other Assets item at their carrying amount.

The government revalues (revaluation) based on the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 75 of 2017 concerning Reassessment of State/Regional Property and Minister of Finance Regulation Number 118/PMK.06/2017 concerning Guidelines for Implementing the Reassessment of State Property. Revaluation is carried out on fixed assets in the form of Land, Buildings and Buildings, as well as Roads, Networks and Irrigation in the form of Bridge Roads and Water Buildings in State Ministries/Institutions according to the State Property codification obtained until December 31, 2015. Included in the scope of the revaluation object are fixed assets in the Ministries/Institutions that are being carried out Utilization.

5. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI revaluasi dilakukan pada tahun 2017.

Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyajian hasil revaluasi BMN dalam Laporan Neraca (laporan posisi di BMN di Neraca) disajikan dengan nilai wajar hasil revaluasi tanpa akumulasi penyusutan. Secara umum akan terdapat tiga jurnal atas transaksi Penilaian Kembali BMN (kecuali atas tanah) yaitu:

- Jurnal untuk menghapus akumulasi penyusutan (kode 205).
- Jurnal koreksi semu untuk menurunkan nilai perolehan menjadi nilai buku (kode 223).
- Jurnal untuk menyesuaikan nilai buku menjadi nilai hasil revaluasi (kode 205).

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

5. Accounting Policies (Continued)

The evaluation in the context of revaluation is carried out with a market data approach, cost approach, and/or income approach by the Government Appraiser within the Directorate General of State Wealth, Ministry of Finance. Revaluation was carried out in 2017 and 2018. At the Republic of Indonesia Supreme Audit Agency the revaluation was carried out in 2017.

Based on consideration of budget efficiency and time of completion, the assessment was carried out by field surveys for valuation objects in the form of land and without field surveys for valuation objects other than land.

The value of fixed assets resulting from the revaluation is a new acquisition value and the accumulated value of depreciation is zero. In the event that the value of a fixed asset revalued is higher than the previous book value, the difference is recognized as an increase in equity in the Financial Report. However, if the value of a fixed asset revalued is lower than the previous book value, the difference is recognized as a reduction in equity in the Financial Report.

Fixed Assets Unused in government operations caused by, among others, worn out, out of date with the needs of the growing organization, severely damaged, inconsistent with the General Spatial Plan, or their useful life has ended up reclassified to Assets Others on Other Assets post.

Fixed assets that are permanently discontinued, are removed from the balance sheet at the time of any proposed removal from the entity in accordance with the provisions of legislation in the management of State of Goods.

Presentation of BMN revaluation in the Balance Sheet Report (position report at BMN on the Balance Sheet) is presented with the fair value of the revaluation result without accumulated depreciation. In general, there will be three journals for BMN Revaluation transactions (except for land), namely:

- *Journal to delete accumulated depreciation (code 205).*
- *A quasi-correction journal to reduce the acquisition value to book value (code 223).*
- *A journal to adjust the book value becomes a revalued value (code 205).*

c. Depreciation of Fixed Assets

Depreciation of property and equipment is a value adjustment in relation to the decrease in the capacity and benefits of a fixed asset. Depreciation policy of fixed assets is based on Regulation of the Minister of Finance No. 65/PMK.06/2017 concerning Depreciation of State Property in the Form of Fixed Assets in Central Government Entities.

5. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- 1) Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 2) Mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa Masa manfaat suatu BMN yang masih diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- 3) Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- 1) Tanah;
- 2) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
- 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan;
- 4) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan;
- 5) Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan
- 6) Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

	Taksiran Masa Manfaat/ Estimated Useful Life	
Peralatan dan Mesin	2 - 20 tahun/years	Equipment and Machine
Gedung dan Bangunan	10-50 tahun/years	Buildings and Properties
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5-40 tahun/years	Roads, Network and Irrigation
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun/years	Other Fixed Assets (Modern Musical Instruments)

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

5. Accounting Policies (Continued)

Depreciation of Fixed Assets is done for:

- 1) Present the value of the Property Equivalent Assets in accordance with the economic benefits of assets in the Central Government Financial Statements;
- 2) Knowing the potential of State of Goods by reporting the remainder the expected benefits of a State of Goods can be obtained in the next few years;
- 3) Provide a more systematic and logical approach to budgeting maintenance expenditures or capital expenditures to replace or add to existing fixed assets.

Depreciation of fixed assets is not carried out against:

- 1) Land;
- 2) Construction in Progress;
- 3) Fixed Assets declared to be lost on the basis of valid source documents or in conditions of serious damage and/or obsolescence that have been proposed to the Goods Manager for removal;
- 4) Fixed Assets in a heavily and/or obsolete condition that has been proposed to the Goods Manager or the Goods Users in accordance with their authority for alienation, destruction or removal;
- 5) Fixed Assets Renovation of Land; and
- 6) Fixed Assets Renovations that do not add to the Benefit Period.

The calculation and recording of Depreciation of Fixed Assets shall be done at the end of each semester without taking into account the residual value.

Depreciation of Fixed Assets is done using the straight-line method by allocating depreciable value of fixed assets equally each semester during the Benefit Period.

The Useful Life of Fixed Assets is determined by referring to Decree of the Minister of Finance No. 59/KMK.06/2013 concerning Table of Benefit Period in the Framework of Depreciation of State Property in the form of Fixed Assets in Central Government Entities. In general, the useful life table is as follows:

d. Long-Term Receivables

Long-term Receivables are receivable that will be due or will be realized more than 12 months from the date of reporting. Included in Long-term Receivables are Accounts Receivable Indemnification of Treasury/Claims Bills that are due for more than one year.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

5. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Piutang TP/TGR yang telah diserahkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN, karena macet dicatat sebagai Tagihan TP/TGR.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Aset Lainnya ini meliputi:

- 1) Aset Tak Berwujud meliputi *software*, lisensi, serta Aset Tak Berwujud Lainnya. Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi amortisasi.

Pada Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi mulai Tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 251/PMK.06/2015 tentang Tatacara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat. Amortisasi yang terjadi pada Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud yang diperoleh tahun 2016 menjadi beban amortisasi Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud yang bersangkutan. Amortisasi yang terjadi pada Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud yang diperoleh sebelum tahun 2016 dilakukan dengan mengkoreksi nilai Ekuitas tahun sebelumnya.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan No. 620/KMK.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara Umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

5. Accounting Policies (Continued)

Treasury Demands shall be claims set by the State Audit Board to treasurers who due to negligence or unlawful acts result in losses of the State/region.

Indemnification Claims is a process done to a civil servant or not a treasurer of a treasurer in order to claim the replacement of a loss suffered by the state as a direct or indirect consequence of an act which is unlawful by the employee or the negligence in the execution the task.

Indemnification of Treasury/Claims receivables that have been submitted to the Ministry of Finance in this case DJKN, since the loss is recorded as Indemnification of Treasury/Claims bills.

e. Other Assets

Other Assets are government assets other than current assets, fixed assets, and long-term receivables. Other Assets include:

- 1) *Intangible assets include software, licenses, and other Intangible Assets. Intangible Assets are identifiable assets that have no physical form and are held for use in the production of goods or services or used for other purposes including intellectual property rights. Intangible Assets are stated at net carrying amount at cost less amortization.*

On Other Assets - Intangible Assets is amortized starting 2016 in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 251/PMK.06/2015 on Amortization Procedures of State Property in the form of Intangible Assets of Government Entities. Amortization occurring on Other Assets - Intangible Assets acquired in 2016 becomes the amortization expense of Other Assets - the Intangible Assets concerned. Amortization occurring on Other Assets - Intangible Assets acquired prior to 2016 is effected by adjustment the value of the previous year's Equity.

The amortization of Intangible Assets with a limited useful life is performed on a straight - line method and residual value of nil. While on Intangible Assets with unlimited period of utilization is not made amortization.

The useful life of Intangible Assets is determined by referring to Decree of the Minister of Finance No. 620/KMK.6/2015 on The Useful life for the Amortization of State Assets in the form of Intangible Assets in Government Entities. In general, the useful life table is as follows:

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

5. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

5. Accounting Policies (Continued)

	<u>Taksiran Masa Manfaat/ Estimated Useful Life</u>	
<i>Software</i> Komputer	4 tahun/years	<i>Computer Software</i>
<i>Franchise</i>	5 tahun/years	<i>Franchise</i>
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10 tahun/years	<i>License, Simple Patent, Brand, Industrial Design, Trade Secret, Layout Design of Integrated Circuit.</i>
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20 tahun/years	<i>Economic Rights of Broadcasting Institution, Common Patents, Crop Variety Protection Annual.</i>
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25 tahun/years	<i>Copyright of Applied Art Works, Annual Plant Variety Protection.</i>
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Prosedur Fonogram.	50 tahun/years	<i>Copyright on Goal Creation. II, Economic Rights Performer Performance, Economic Rights Procedur Phonogram.</i>
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun/years	<i>Copyright on Gol Creation.I</i>
2) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas dan disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.		2) <i>Other Assets in the form of government fixed assets that are discontinued from the operational use of the entity and are presented at book value at cost less accumulated depreciation.</i>
f. Kewajiban		f. <i>Liabilities</i>
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.		<i>Liability is a debt arising from past events whose settlement resulted in a flow of government economic resources. Government liabilities are classified into short-term liabilities and long-term liabilities.</i>
1) Kewajiban Jangka Pendek		1) <i>Short-Term Liabilities</i>
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dalam pengelolaan keuangan BPK terdiri dari:		<i>An liabilities are classified as a short-term liability if expected to be paid or due within twelve months after the date of reporting. Short-term liabilities in BPK financial management consist of:</i>
1. Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari:		1. <i>Payable to Third Parties from:</i>
- Belanja yang masih harus dibayar yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.		- <i>Accrued expenditures consisting of employee expenditures, goods expenditures, and capital expenditures.</i>
- Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya yang merupakan kontra akun dari Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.		- <i>Debt to Other Third Parties which is the contra-account counter from Other Cash in the Spending Treasurer.</i>
Kewajiban ini timbul akibat hak atas barang/jasa telah diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan oleh kementerian negara/Lembaga/pemerintah, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Khusus untuk belanja modal yang masih harus dibayar tidak mempengaruhi beban laporan operasional, tetapi bersamaan dengan pengakuan belanja modal yang masih harus dibayar harus diakui adanya aset yang diperoleh.		<i>This liabilities accrued because the right to goods/services has been received and enjoyed and/or the commitment agreement has been made by the state ministries/Institutions/government, but until the end of the reporting period has not been paid/settlement/realization of the rights/agreements/commitments. Specifically for the accrued capital expenditures does not affect the burden of the operational report, but simultaneously with the recognition of the accrued capital expenditure an asset is recognized.</i>

5. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

Dengan demikian apabila terdapat aset yang sudah diperoleh yang belum dibayar diakui sebagai kewajiban.

Pada saat pembayaran belanja yang masih harus dibayar tahun sebelumnya, dilakukan penyesuaian dengan cara mendebet akun belanja yang masih harus dibayar dan mengkredit akun beban pada tanggal yang sama. Dalam hal penyesuaian tidak dapat dilakukan pada tanggal transaksi, maka harus diperhitungkan pada akhir tahun untuk menentukan besarnya nilai pada jurnal penyesuaian.

2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan pajak dan/atau pendapatan bukan pajak yang sudah diterima di rekening kas negara tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga atau adanya kelebihan pembayaran oleh pihak ketiga tetapi belum dikembalikan. Pendapatan diterima dimuka di BPK antara lain berupa Pendapatan Sewa Diterima Dimuka. Pendapatan Sewa Diterima di Muka untuk masa lebih dari satu tahun tidak dipisahkan sebagai akun tersendiri baik yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun maupun lebih dari 1 (satu) tahun seluruhnya dicatat sebagai kewajiban jangka pendek.

Adapun metode perhitungan Pendapatan Sewa diterima di Muka adalah jumlah hari sisa masa sewa yang belum dinikmati oleh Pihak Ketiga dibagi jumlah hari seluruhnya dikalikan dengan nilai sewa yang dibayarkan oleh pihak ketiga.

3. Uang Muka dari KPPN

Akun Uang Muka dari KPPN merupakan jumlah kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang digunakan untuk membayar belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kontra akun Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari pajak yang sudah dipotong oleh Bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal Neraca.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Sampai saat ini BPK tidak mempunyai Kewajiban Jangka Panjang.

5. Accounting Policies (Continued)

Thus, if any unearned assets are recognized as liabilities.

At the time of payment of expenditures accrued in the previous year, adjustments are made by debiting the accrued expense account and crediting the expense account on the same date. In the event that the adjustment can not be made on the date of the transaction, it must be calculated at the end of the year to determine the value of the adjusting entries.

2. Deferred Revenues

Revenue received in advance are tax revenues and/or non-tax revenues already received in the state treasury account but are not yet entirely entitled to the government because they are still inherent in the government's obligation to provide future goods/services to third parties or any excess payment by third parties but not been restored. Revenue received in advance at the BPK is in the form of Rental Income Received Upfront. Rental Income Accepted Advance for more than one year is not separated as a separate account whose terms of less than 1 (one) year or more than 1 (one) year are all recorded as short-term liabilities.

The method of calculating the Rent Revenue received in advance is the amount of remaining days of rental period not used yet by the Third Party divided by the total number of days multiplied by the rent paid by the third party.

3. Advance from The Office of State Treasury Service

The Advance Payment Account of The Office of State Treasury Service is the amount of cash in the Spending Treasurer derived from the Inventory money and Additional Inventory Money used to pay personnel expenditures, goods expenditures and capital expenditures.

4. Other Short-Term Payable

Other Short Term payable contra-account is the counter of other Cash and Cash Equivalents account derived from taxes already withheld by the Spending Treasurer but not yet paid to the State Treasury up to the Balance Sheet date.

2) Long-Term Liabilities

Liabilities are classified as long-term liabilities if expected to be paid or matured more than twelve months after the date of reporting. Liabilities are recorded at nominal value, which is the value of the government's liabilities at the first transaction. To date, BPK has no Long-Term Liabilities.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

5. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

g. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Nilai Ekuitas Awal merupakan Nilai Ekuitas yang berasal dari nilai Ekuitas Akhir tahun yang lalu.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

5. Accounting Policies (Continued)

g. Equity

Equity represents the difference between assets and liabilities in a period. Beginning Balance of Equity represents the Equity Value derived from the value of the Equity at the End of the previous year.

Further disclosures of equity are presented in the Statement of Changes in Equity.

6. Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Anggaran dan realisasi pendapatan TA 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian/Descriptions	Estimasi dan Anggaran/ Estimation and Budget	Realisasi (Netto)/ Realization (Neto)	Selisih/ Difference	% Realisasi/ % Realization
Pendapatan/Revenues	5,066,345,000	22,776,536,895	17,710,191,895	449.57
- Penerimaan Negara Bukan Pajak/ Non-Tax Income	5,066,345,000	22,776,536,895	17,710,191,895	449.57
- Hibah/Grants	-	-	-	-

6. Budget and Realization of Revenues

The budget and realization of revenues TA 2018 are as follows:

Realisasi Pendapatan dan Hibah pada TA 2018 adalah sebesar Rp22.776.536.895 atau mencapai 449,57% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp5.066.345.000. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Pengelolaan BMN, Pendapatan Pendidikan, Pendapatan Jasa Lainnya, Pendapatan Denda, dan Pendapatan Lain-lain.

Actual Revenues and Grants in FY 2018 amounted Rp22,776,536,895 or 449.57% of the estimated revenue of Rp5,066,345,000. This income consists of Revenues from State of Goods Management, Education Income, Other Service Revenue, Fine Income, and Other Income.

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan TA 2018 adalah sebagai berikut:

The details of the estimated and realized revenues of FY 2018 are as follows:

No.	Uraian Pendapatan dan Hibah/ Descriptions Revenues and Grants	Estimasi Pendapatan/ Revenues Estimation	Realisasi Pendapatan/ Revenues Realization	%
1.	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN (4251)/Revenues from Sales, BMN Management, Business Entity Contributions and BMN Insurance Claims Receipt (4251)	1,195,275,000	3,960,319,164	331.33
2.	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (4254)/Revenues from Education, Culture, Research and Technology (4254)	3,871,070,000	5,104,320,000	131.86
3.	Pendapatan Jasa Lainnya (4256)/Other Service Revenues (4256)	-	3,828,156,585	-
4.	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan (4257)/Interest Income, Banking Account Management and Financial Management (4257)	-	155,056,858	-
5.	Pendapatan Denda (4258)/Fine Income (4258)	-	147,775,690	-
6.	Pendapatan Lain-lain (4259)/Other Income (4259)	-	9,580,908,598	-
Jumlah/Total		5,066,345,000	22,776,536,895	449.57

Realisasi pendapatan TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp2.649.755.677 atau sebesar 13,17% dari realisasi pendapatan TA 2017 sebesar Rp20.126.781.218 dengan rincian sebagai berikut:

Realization of FY 2018 revenues increased by Rp2,649,755,677 or 13.17% of total revenue of FY 2017 amounting to Rp20,126,781,218, the details are as follows:

6. Anggaran dan Realisasi Pendapatan (Lanjutan)

6. Budget and Realization of Revenues (Continued)

No.	Uraian Pendapatan dan Hibah/Descriptions of Revenues & Grants	TA 2018/FY 2018	TA 2017/FY 2017	Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
				Rp	%
1.	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN (4251)/Revenues from Sales, BMN Management, Business Entity Contributions and BMN Insurance Claims Receipt (4251)	3,960,319,164	3,553,904,215	406,414,949	11.44
2.	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (4254)/Revenues from Education, Culture, Research and Technology (4254)	5,104,320,000	4,047,490,000	1,056,830,000	26.11
3.	Pendapatan Jasa Lainnya (4256)/Other Service Revenues (4256)	3,828,156,585	3,512,112,086	316,044,499	9.00
4.	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan (4257)/Interest Income, Banking Account Management and Financial Management (4257)	155,056,858	468,360,328	(313,303,470)	(66.89)
5.	Pendapatan Denda (4258)/Fine Income (4258)	147,775,690	176,620,816	(28,845,126)	(16.33)
6.	Pendapatan Lain-lain (4259)/Other Income (4259)	9,580,908,598	8,368,293,773	1,212,614,825	14.49
Jumlah/Total		22,776,536,895	20,126,781,218	2,649,755,677	13.17

Pada TA 2018 terdapat perubahan Bagan Akun Standar sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

In FY 2018 there is a change in the Standard Account Chart in accordance with the Decree of the Director General of Treasury Number KEP-211/PB/2018 dated March 29, 2018 concerning the Coding of Account Segments in the Standard Account Chart.

a. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN

Realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN (4251) tahun 2018 adalah sebesar Rp3.960.319.164 atau 331.33% dari estimasi pendapatan sebesar Rp1.195.275.000. Realisasi pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp406.414.949 atau 11,44% dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp3.553.904.215.

Kenaikan realisasi pendapatan tersebut antara lain disebabkan:

1. Adanya kenaikan pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya karena kenaikan pendapatan dari kegiatan lelang BMN.
2. Adanya pendapatan dari penggunaan sarana dan prasarana sesuai Tusi pada satker Badan Diklat PKN.

a. Revenues from Sales, BMN Management, Business Entity Contributions and BMN Insurance Claims Receipt

Realization of revenues from Sales, BMN Management, Business Entity Contribution and BMN Insurance Claims Receipt (4251) in 2018 amounting to Rp3,960,319,164 or 331.33% of the estimated revenue of Rp1,195,275,000. This revenue realization increased by Rp406,414,949 or 11.44% compared to the realization in 2017 of Rp3,553,904,215.

The increase in realization of revenues was partly due to:

1. *There is an increase in income from other BMN transfers due to an increase in income from BMN auction activities.*
2. *There is an income from the use of facilities and infrastructure in accordance with Tusi at the PKN Training Institution.*

b. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi

Realisasi Pendapatan dari Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (4254) tahun 2018 adalah sebesar Rp5.104.320.000 atau 131.86% dari estimasi pendapatan sebesar Rp3.871.070.000. Realisasi pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.056.830.000 atau 26,11% dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp4.047.490.000.

Hal ini disebabkan antara lain karena adanya kenaikan pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan pada Satker Badan Diklat PKN.

b. Revenues from Education, Culture, Research and Technology

Realization of revenues from Education, Culture, Research and Technology Income (4254) in 2018 is Rp5,104,320,000 or 131.86% of the estimated earnings of Rp3,871,070,000. Realization increased by Rp1,056,830,000 or 26.11% compared to the realization in 2017 of Rp4,047,490,000.

This is due to an increase in earnings from education and/or training services in the PKN Training Agency Work Unit.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

6. Anggaran dan Realisasi Pendapatan (Lanjutan)

c. Pendapatan Jasa Lain

Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya (4256) tahun 2018 adalah sebesar Rp3.828.156.585. Tidak ada estimasi pendapatan untuk pendapatan jasa lainnya. Realisasi pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp316.044.499 atau 9,00% dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp3.512.112.086.

Pendapatan Jasa Lainnya merupakan penerimaan *Audit Fee* dari *International Atomic Energy Agency (IAEA)*.

Penyetoran *Audit Fee* atas pemeriksaan Laporan Keuangan IAEA dengan menggunakan valuta Euro dilakukan langsung ke Rekening Kas Umum Negara di Bank Indonesia dengan nomor rekening 600.502991980 sebagai berikut:

1. Sesuai surat konfirmasi dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara Nomor S-1914/PB.3/2018 tanggal 23 Februari 2018 sebesar Eur103.445 atau Rp1.736.325.359.
2. Sesuai surat konfirmasi dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara Nomor S-15/PB.3/2019 tanggal 11 Januari 2019 sebesar Eur22.191,49 atau Rp369.485.424 dan sebesar Eur103.445 atau Rp1.722.345.802.

d. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan

Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan (4257) tahun 2018 adalah sebesar Rp155.056.858. Tidak ada estimasi pendapatan untuk pendapatan ini. Realisasi pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp313.303.470 atau 66,89% dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp468.360.328.

Penurunan disebabkan karena berkurangnya pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

Realisasi Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan/Jasa Giro (425764) sebesar Rp604.741 merupakan realisasi pendapatan pada satuan kerja Balai Diklat Yogyakarta sebesar Rp463.826 dan BPK Perwakilan Kepulauan Riau sebesar Rp140.915. Hal ini terjadi karena rekening atas nama Balai Diklat Yogyakarta di Bank Negara Indonesia cabang Yogyakarta dengan nomor rekening 0505446702 dan rekening atas nama BPG 137 BPK Batam di Bank Negara Indonesia cabang Batam dengan Nomor Rekening 7784685752 belum terdaftar dalam Treasury National Pooling (TNP). Satker Balai Diklat Yogyakarta dan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan koordinasi ke KPPN dan Bank BNI setempat dan sedang dalam proses penyelesaian.

e. Pendapatan Denda

Realisasi Pendapatan Denda (4258) tahun 2018 adalah sebesar Rp147.775.690. Tidak ada estimasi pendapatan untuk pendapatan ini. Realisasi pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp28.845.126 atau 16,33% dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp176.620.816.

6. Budget and Realization of Revenues (Continued)

c. Other Service Revenues

Realization of Other Service Revenues (4256) in 2018 amounted to Rp3,828,156,585. There is no estimated income for other service revenues. This revenue realization increased by Rp316,044,499 or 9.00% compared to 2017 realization of Rp3,512,112,086.

Other Service Revenues represent the receipt of Audit Fee from the International Atomic Energy Agency (IAEA).

Depositing of Audit Fee for inspection of IAEA Financial Reports using Euro currency is made directly into the State General Cash Account at Bank Indonesia with the account number 600.502991980 as follows:

1. According to the confirmation letter from the State Treasury Management Directorate Number S-1914/PB.3/2018 dated February 23, 2018 amounting to Eur103,445 or Rp1,736,325,359.
2. As per the confirmation letter from the State Treasury Management Directorate Number S-15/PB.3/2019 dated January 11, 2019 amounting to Eur22,191.49 or Rp369,485,424 and amounting to Eur103,445 or Rp1,722,345,802.

d. Interest Income, Banking Account Management and Financial Management

Realization of Interest Income, Management of Banking Accounts and Financial Management (4257) in 2018 amounting to Rp155,056,858. There is no estimated income for this income. This revenue realization decreased by Rp313,303,470 or 66.89% compared to the realization in 2017 of Rp468,360,328.

The decrease was due to the reduced income from settling state compensation for government employees, not treasurers or other officials.

Realization of Income from Financial Services/Current Account Services (425764) amounting to Rp604,741 is the realization of income from Yogyakarta Education and Training Center in the amount of Rp.463,826 and BPK of Riau Islands Representative of Rp140,915. This happens because the account is in the name of the Yogyakarta Training Center in the Yogyakarta branch of Bank Negara Indonesia with account number 0505446702 and an account in the name BPG 137 BPK Batam at the Batam branch of Bank Negara Indonesia with Account Number 7784685752 not registered in Treasury National Pooling (TNP). The Yogyakarta Education and Training Center Satker and the BPK Representative of the Riau Islands Province have coordinated with the local KPPN and Bank BNI and are in the process of being resolved.

e. Fine Income

Realization of fine income (4258) in 2018 amounting to Rp147,775,690. There is no estimated income for this income. This revenue realization decreased by Rp28,845,126 or 16.33% compared to the realization in 2017 of Rp.176,620,816.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

6. Anggaran dan Realisasi Pendapatan (Lanjutan)

f. Pendapatan Lain-lain

Realisasi Pendapatan Lain-lain (4259) tahun 2018 adalah sebesar Rp9.580.908.598. Tidak ada estimasi pendapatan untuk pendapatan ini. Realisasi pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.212.614.825 atau 14.49% dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp8.368.293.773.

Kenaikan ini diantaranya disebabkan karena kenaikan pendapatan sebagai berikut:

- 1) Kenaikan yang berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911), Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912) dan Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (425913).
- 2) Kenaikan Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS (425931).
- 3) Kenaikan Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji (425991).

6. Budget and Realization of Revenues (Continued)

f. Other Income

Realization of Other Revenues (4259) in 2018 amounting to Rp9,580,908,598. There is no estimated income for this income. This revenue realization increased by Rp1,212,614,825 or 14.49% compared to the realization in 2017 of Rp8,368,293,773.

This increase was partly due to the increase in income as follows:

- 1) The increase originating from Employee Expenditure Revenue TAYL (425911), Re-receipt of Goods Expenditures TAYL (425912) and Capital Expenditure Revenue TAYL (425913).
- 2) Increase in Deposit Income from Retired Non-TP/TGR Debt Remnants of Civil Servants (425931).
- 3) Increase in Acceptance of Returns on Advances/Advances for Salaries (425991).

7. Anggaran dan Realisasi Belanja

7. Budget and Realization of Expenditures

Uraian/Descriptions	Estimasi dan Anggaran/ Estimation and Budget	Realisasi (Netto)/ Realization (Neto)	Selisih/ Difference	% Realisasi/ % Realization
Belanja/Expenditures	3,627,420,844,000	3,543,596,769,013	(83,824,074,987)	97.69
- Belanja Pegawai/ Employee Expenditure	1,955,178,389,000	1,935,394,391,927	(19,783,997,073)	98.99
- Belanja Barang/ Goods Expenditure	1,534,727,080,000	1,471,421,078,750	(63,306,001,250)	95.88
- Belanja Modal/ Capital Expenditure	137,515,375,000	136,781,298,336	(734,076,664)	99.47

Realisasi Belanja pada pada TA 2018 adalah sebesar Rp3.543.596.769.013 atau 97,69% dari anggaran belanja sebesar Rp3.627.420.844.000.

Realisasi Belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp873.038.622.897 atau 32,69% dari realisasi belanja TA 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Expenditures realization in FY 2018 amounted Rp3,543,596,769,013 or 97.69% of the budget of Rp3,627,420,844,000.

Realized Expenditures for FY 2018 increased by Rp873,038,622,897 or 32.69% of actual expenditure of FY 2017 with details as follows:

No.	Uraian Jenis Belanja/Descriptions of Expenditures	TA 2018/FY 2018	TA 2017/FY 2017	Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
				Rp	%
1.	Belanja Pegawai/Employee Expenditures	1,935,394,391,927	1,135,348,569,875	800,045,822,052	70.47
2.	Belanja Barang/Goods Expenditures	1,471,421,078,750	1,387,394,996,562	84,026,082,188	6.06
3.	Belanja Modal/Capital Expenditures	136,781,298,336	147,814,579,679	(11,033,281,343)	(7.46)
Jumlah/Total		3,543,596,769,013	2,670,558,146,116	873,038,622,897	32.69

Kenaikan realisasi belanja TA 2018 dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2017 antara lain disebabkan:

- 1) Kenaikan realisasi belanja pegawai dikarenakan adanya pembayaran tunjangan pejabat tertentu, adanya penerimaan pegawai baru, dan kenaikan pangkat pegawai;
- 2) Kenaikan realisasi belanja barang khususnya belanja barang non operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri;

The increase in realization of TA 2018 expenditure compared to the realization of 2017 TA spending is due to:

- 1) The increase in the realization of personnel expenditure was attributed to the payment of certain official benefits, the existence of new employee admissions, and promotion of employees;
- 2) Increase in realization of goods expenditures especially non-operational goods expenditure, service expenditure, maintenance expenditure, domestic official travel expenses and foreign official travel;

7. Anggaran dan Realisasi Belanja (Lanjutan)

- 3) Penurunan realisasi belanja modal terjadi karena adanya penurunan dari rencana awal penganggaran atas belanja modal.

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2018 adalah sebesar Rp1.935.394.391.927 atau 98,99% dari Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp1.955.178.389. Realisasi Belanja ini mengalami kenaikan sebesar Rp800.045.822.052 atau 70,47% dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp1.135.348.569.875.

Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- 1) Adanya pembayaran tunjangan pejabat tertentu yang mulai dibayar pada tahun anggaran 2018;
- 2) Adanya penambahan pegawai dari penerimaan CPNS baik pada satker perwakilan maupun kantor pusat.

Realisasi Pengembalian Belanja Pegawai TA 2018 adalah sebesar Rp9.628.906.465 terdiri dari:

- 1) Pengembalian belanja gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp251.567.353;
- 2) Pengembalian belanja gaji dan tunjangan Pejabat Negara sebesar Rp117.000.000;
- 3) Pengembalian belanja lembur Rp548.150;
- 4) Pengembalian belanja tunjangan khusus dan belanja pegawai transito sebesar Rp9.259.790.962.

b. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang tahun 2018 adalah sebesar Rp1.471.421.078.750 atau 95,88% dari anggaran Belanja Barang sebesar Rp1.534.727.080.000. Realisasi Belanja ini mengalami kenaikan sebesar Rp84.026.082.188 atau 6,06% dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp1.387.394.996.562.

Hal ini disebabkan antara lain karena adanya kenaikan standar biaya terkait perjalanan dinas baik dalam negeri maupun luar negeri, dan kenaikan belanja jasa.

Realisasi Pengembalian Belanja Barang TA 2018 adalah sebesar Rp16.410.819.797 terdiri dari:

- 1) Pengembalian Belanja Barang Operasional sebesar Rp1.636.269.438;
- 2) Pengembalian Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp17.106.310;
- 3) Pengembalian Belanja Jasa sebesar Rp33.243.000;

- 4) Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp12.253.659.860;
- 5) Pengembalian Belanja Perjalanan Luar Negeri sebesar Rp2.470.541.189;

Realisasi Belanja Barang yang dikapitalisasi ke aset tetap adalah sebesar Rp3.473.447.366 terdiri dari:

- 1) Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.200.953.101;
- 2) Kapitalisasi pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.100.768.068;
- 3) Kapitalisasi pada Jaringan sebesar Rp171.726.197;

7. Budget and Realization of Expenditures (Continued)

- 3) The decrease in capital expenditure realization occurred due to a decrease from the initial plan of budgeting on capital expenditure.

a. Employee Expenditures

Realization of Employee Expenditure in 2018 amounting to Rp1,935,394,391,927 or 98.99% of the Employee Expenditure Budget of Rp1,955,178,389. This expenditure realization increased by Rp800,045,822,052 or 70.47% compared to the realization in 2017 of Rp1,135,348,569,875.

This is due to among others by:

- 1) There is payment of certain official benefits that have been paid in the 2018 budget year;
- 2) There are additional employees from CPNS acceptance both at the representative unit and the head office.

Realization of Employee Expenditure Returns for 2018 amounting to Rp9,628,906,465 consisting of:

- 1) Returns on civil servant salary and allowance expenditure of Rp251,567,353;
- 2) Return on State Official salary and allowance expenditure of Rp117,000,000;
- 3) Returns overtime spending of Rp548,150;
- 4) Returns on special allowances and personnel expenditure for Rp9,259,790,962.

b. Goods Expenditures

Realization of Goods Expenditure in 2018 amounting to Rp1,471,421,078,750 or 95.88% of the Goods Expenditure Budget of Rp1,534,727,080,000. This expenditure realization increased by Rp84,026,082,188 or 6.06% compared to the realization in 2017 of Rp1,387,394,996,562.

This is due to the increase in the standard of costs related to official travel both domestically and abroad, and the increase in service spending.

Realization of Return on Expenditures for Goods in 2018 amounting to Rp16,410,819,797 consists of:

- 1) Return on Operational Goods Expenditures amounting to Rp1,636,269,438;
- 2) Return on Non-Operating Goods Expenditures amounting to Rp17,106,310;
- 3) Returns for Service Expenditures amounting to Rp33,243,000;
- 4) Returns for Domestic Travel Expenditures amounting to Rp12,253,659,860;
- 5) Return on Overseas Travel Expenditures amounting to Rp2,470,541,189;

Realization of Goods Expenditures capitalized to property and equipment amounting to Rp3,473,447,366 consists of:

- 1) Capitalization of Equipment and Machinery is Rp1,200,953,101;
- 2) Capitalization of Buildings and Buildings amounting to Rp2,100,768,068;
- 3) Capitalization on the Network amounting to Rp171,726,197;

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

7. Anggaran dan Realisasi Belanja (Lanjutan)

c. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun 2018 adalah sebesar Rp136.781.298.336 atau 99,47% dari anggaran Belanja Modal sebesar Rp137.515.375.000. Realisasi Belanja ini mengalami penurunan sebesar Rp11.033.281.343 atau 7,46% dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp147.814.579.679.

Hal ini disebabkan oleh berkurangnya pagu anggaran belanja modal BPK pada tahun 2018.

8. Kas Lainnya dan Setara Kas

	31 Desember/December 31, 2018	2017
Pendapatan yang Belum Disetor ke Kas Negara	43,200,924,642	4,072,407,788
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	21,659,150	81,779,050
Utang Jangka Pendek Lainnya	1,286,850	43,936,941
Jumlah	43,223,870,642	4,198,123,779

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp43.223.870.642 dan Rp4.198.123.779 terjadi kenaikan sebesar Rp39.025.746.863 atau 929,60%.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

9. Belanja Dibayar Dimuka

	31 Desember/December 31, 2018	2017
Belanja Barang Dibayar Dimuka	346,688,144	357,453,807
Belanja Modal Dibayar Dimuka	7,734,954,000	-
Jumlah	8,081,642,144	357,453,807

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp8.081.642.144 dan Rp357.453.807, terjadi kenaikan sebesar Rp7.724.188.337 atau 2.160,89%.

Belanja Dibayar di muka berasal dari realisasi belanja tahun pelaporan, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum seluruhnya diterima/dinikmati oleh satuan kerja.

10. Piutang Bukan Pajak

	31 Desember/December 31, 2018	2017
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	5,660,586	3,273,141,213
Piutang Lainnya	611,061,871	353,827,473
Jumlah	616,722,457	3,626,968,686

7. Budget and Realization of Expenditures (Continued)

c. Capital Expenditures

Realization of Capital Expenditures in 2018 amounting to Rp136,781,298,336 or 99.47% of the Capital Expenditure Budget of Rp137,515,375,000. This expenditure realization decreased by Rp11,033,281,343 or 7.46% compared to the realization in 2017 of Rp147,814,579,679.

This is due to the reduction in the BPK's capital expenditure budget ceiling in 2018.

8. Other Cash and Cash Equivalent

Other Cash and Cash Equivalents as of December 31, 2018 and 2017 each of them amounting to Rp43,223,870,642 and Rp4,198,123,779, increased by Rp39,025,746,863 or 929.60%.

Other Cash and Cash Equivalents are cash which are under the responsibility of the expenditure treasurer that are not derived from the UP/TUP, whether bank account balances or cash.

9. Prepaid Expenditure

	Prepaid Goods Expenditure
	Prepaid Capital Expenditure
Total	Total

Prepaid Expenditure as of December 31, 2018 and 2017 each of them amounting to Rp8,081,642,144 and Rp357,453,807, increased by Rp7,724,188,337 or 2.160.89%.

Prepaid Expenditures are derived from the actual expenditure of the reporting year, but goods/services/facilities from third parties have not been fully received/used by the working unit.

10. Non Tax Receivable

	Non Tax Receivable
	Other Receivable
Total	Total

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

10. Piutang Bukan Pajak (Lanjutan)

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp616.722.457 dan Rp3.626.968.686, terjadi penurunan sebesar Rp3.010.246.229 atau 82,99%.

Piutang bukan pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 adalah piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp192.770.935 dan piutang lainnya sebesar Rp423.951.522.

11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	(28,304)	(16,365,705)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	(79,565,836)	(9,074,162)
Jumlah	(79,594,140)	(25,439,867)

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp79.594.140 dan Rp25.439.867, terjadi kenaikan sebesar Rp54.154.273 atau 212,87%.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besarnya tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak adalah penyisihan piutang tidak tertagih-piutang PNPB sebesar Rp963.855 dan penyisihan piutang tidak tertagih-piutang lainnya sebesar Rp78.630.285.

12. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	14,400,000	14,400,000
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	91,826,996	27,046,296
Jumlah	106,226,996	41,446,296

10. Non Tax Receivable (Continued)

Non-Tax Accounts Receivable as of December 31, 2018 and 2017 amounted Rp616,722,457 and Rp3,626,968,686 respectively, decreased of Rp3,010,246,229 or 82.99%.

Non-tax receivables are receivables arising from non-tax state revenues outstanding until the end of the financial statements period.

Details of Non Tax Receivables as of December 31, 2018 are Non-Tax State Revenue receivable amounted Rp192,770,935 and other receivable amounted Rp423,951,522.

11. Allowance for Doubtful Accounts-Non Taxes Accounts

Allowance for Doubtful Accounts - Non Tax Receivable

Allowance for Doubtful Accounts - Other Receivable

Total

Allowance for Doubtful Accounts Receivable-Non-Tax Receivables as of December 31, 2018 and 2017 amounting to Rp79,594,140 and Rp25,439,867 respectively, an increase of Rp54,154,273 or 212,87%.

Allowance for Doubtful Accounts Receivables is reserves that must be established for a certain percentage of accounts receivable based on the classification of receivable qualities. The classification of the quality of receivables is one of the basis for determining the amount of allowance for receivables. Assessment of receivables quality is done by considering the maturity and development of collection efforts conducted by the government.

The quality of receivables is based on the condition of each receivable at the date of reporting in accordance with the Regulation of the Minister of Finance No. 69/PMK.06/2014 regarding Quality Determination of Receivables and the Establishment of Doubtful Allowance at State Ministries/Agencies and State Treasurers.

Details of Allowance for Doubtful Accounts-Non-Tax Debts are allowance for doubtful accounts-non-tax income receivable amounted Rp963,855 and allowance for doubtful accounts-other receivable amounted Rp78,630,285.

12. Current Portion Indemnification of Treasury/Claims Bills-Net

Current Portion Indemnification of Treasury Bill

Current Portion Indemnification of Claims Bill

Total

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

12. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) (Lanjutan)

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp106.226.996 dan Rp41.446.296 terjadi kenaikan sebesar Rp64.780.700 atau 156,30%.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

13. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

	31 Desember/December 31,
	2018
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	(72,000)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	(13,847,051)
Jumlah	(13,919,051)

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp13.919.051 dan Rp13.595.148, terjadi kenaikan sebesar Rp323.903 atau 2,38%.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

14. Persediaan

	31 Desember/December 31,
	2018
Barang Konsumsi	12,179,736,378
Bahan Untuk Pemeliharaan	1,457,875,231
Suku Cadang	436,704,816
Pita Cukai, Materai, dan Leges	-
Persediaan Lainnya	1,769,296,103
Jumlah	15,843,612,528

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp15.843.612.528 dan Rp15.887.954.266, terjadi penurunan sebesar Rp44.341.738 atau 0,28%. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan digunakan untuk kegiatan operasional Satuan Kerja dalam kondisi baik.

12. Current Portion Indemnification of Treasury/Claims Bills-Net (Continued)

Current Balance of Indemnification of Treasury/Claims Bills as of December 31, 2018 and 2017 amounting to Rp106,226,996 and Rp41,446,296 respectively, an increase of Rp64,780,700 or 156.30%.

Current Section Indemnification of Treasury/Claims Bills is an outstanding Indemnification of Treasury/Claims Bills on the balance sheet date due in 12 months or less.

13. Allowance for Doubtful Accounts-Current Portion of Indemnification of Treasury/Claims Bill

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Current Portion Indemnification of Treasury Bill	(72,000)	(72,000)
Current Portion Indemnification of Claims Bill	(13,523,148)	(13,523,148)
Total	(13,595,148)	(13,595,148)

Allowance for Doubtful Accounts-Current Portion of Treasury/Indemnification Claims Bill as of December 31, 2018 and 2017 amounting to Rp13,919,051 and Rp13,595,148, respectively increased by Rp323,903 or 2.38%.

Allowance for Doubtful Accounts-Current Portion of Indemnification of Treasury/Claims Bill is an estimate of the Current Portion of Indemnification of Treasury/Claims determined by the quality of each receivable.

14. Inventories

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Consumer Goods	12,520,965,231	12,520,965,231
Materials for Maintenance	1,032,999,250	1,032,999,250
Spare Parts	366,249,896	366,249,896
Pita, Taxes, Material and Leges	5,418,000	5,418,000
Others Inventory	1,962,321,889	1,962,321,889
Total	15,887,954,266	15,887,954,266

Balance of Inventories as of December 31, 2018 and 2017 amounting to Rp15,843,612,528 and Rp15,887,954,266, respectively, decreased by Rp44,341,738 or 0.28%. Inventory is a type of asset in the form of goods or supplies at the balance sheet date obtained for the purpose of supporting operational activities and to be submitted for public service.

The above inventory is used for operating activities of the unit work in good condition.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

14. Persediaan (Lanjutan)

Adapun persediaan dalam kondisi usang/rusak yaitu:

- 1) Persediaan rusak sebesar Rp3.792.020 terjadi pada satker:
 - a. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp329.000
 - b. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp3.463.020
- 2) Persediaan usang sebesar Rp1.073.138 terjadi pada satker:
 - a. BPK Perwakilan Provinsi Aceh sebesar Rp760.150
 - b. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp98.448
 - c. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp210.000
 - d. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar (Rp9.460)
 - e. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sebesar Rp14.000

14. Inventories (Continued)

The inventory in the condition of obsolete/damaged namely:

- 1) Damaged of inventories of Rp3,792,020 occurred at the working unit:
 - a. BPK Representative of Kepulauan Riau Province amounting to Rp329,000.
 - b. BPK Representative of Southeast Sulawesi Province amounting to Rp3,463,020.
- 2) Obsolete of inventory of Rp1,073,138 occurred at the working unit:
 - a. BPK Representative of Aceh Province Rp760,150
 - b. BPK Representative of east Java Province Rp98,448
 - c. BPK Representative of North Sulawesi Province amounting to Rp210,000.
 - d. BPK Representative of Central Sulawesi Province amounting to (Rp9,460).
 - e. BPK Representative of Gorontalo Province Rp14,000

15. Aset Tetap

15. Fixed Assets

2018				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Reklasifikasi/ Additions/ Reclassifications	Pengurangan/ Reklasifikasi/ Disposals/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance
Harga Perolehan				Acquisition Cost
Tanah	1,857,964,547,083	3,947,453,769,660	3,815,713,644,692	1,989,704,672,051
Peralatan dan Mesin	1,961,947,628,280	145,021,016,262	135,424,120,155	1,971,544,524,387
Gedung dan Bangunan	2,325,635,127,982	215,485,003,284	208,148,622,623	2,332,971,508,643
Jalan, Irigasi dan Jaringan	352,210,045,652	3,276,752,480	2,937,559,019	352,549,239,113
Aset Tetap Lainnya	23,870,580,607	53,939,382,691	53,480,852,970	24,329,110,328
Konstruksi dalam Pengerjaan	17,328,422,600	37,383,053,286	35,785,510,600	18,925,965,286
	6,538,956,352,204	4,402,558,977,663	4,251,490,310,059	6,690,025,019,808
2018				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Reklasifikasi/ Additions/ Reclassifications	Pengurangan/ Reklasifikasi/ Disposals/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance
Akumulasi Penyusutan				Accumulated Depreciation
Peralatan dan Mesin	1,502,512,437,022	244,753,479,810	116,508,912,699	1,630,757,004,133
Gedung dan Bangunan	264,185,397,241	326,326,255,202	274,329,013,298	316,182,639,145
Jalan, Irigasi dan Jaringan	203,330,032,143	40,452,312,687	27,392,054,967	216,390,289,863
Aset Tetap Lainnya	402,519,155	94,127,876	14,231,250	482,415,781
	1,970,430,385,561	611,626,175,575	418,244,212,214	2,163,812,348,922
Nilai Buku Bersih	4,568,525,966,643			4,526,212,670,886
2017				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Reklasifikasi/ Additions/ Reclassifications	Pengurangan/ Reklasifikasi/ Disposals/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance
Harga Perolehan				Acquisition Cost
Tanah	1,771,760,496,768	4,056,747,600,996	3,970,543,550,681	1,857,964,547,083
Peralatan dan Mesin	1,870,744,454,733	231,702,483,696	140,499,310,149	1,961,947,628,280
Gedung dan Bangunan	2,268,269,681,712	723,108,597,127	665,743,150,857	2,325,635,127,982
Jalan, Irigasi dan Jaringan	341,620,494,978	61,058,461,953	50,468,911,279	352,210,045,652
Aset Tetap Lainnya	82,079,788,844	61,958,443,690	120,167,651,927	23,870,580,607
Konstruksi dalam Pengerjaan	19,506,469,353	26,444,630,247	28,622,677,000	17,328,422,600
	6,353,981,386,388	5,161,020,217,709	4,976,045,251,893	6,538,956,352,204

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

15. Aset Tetap (Lanjutan)

15. Fixed Assets (Continued)

	2017				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Reklasifikasi/ Additions/ Reclassifications	Pengurangan/ Reklasifikasi/ Disposals/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Peralatan dan Mesin	1,307,600,130,357	217,580,303,839	22,667,997,174	1,502,512,437,022	Machinery and Equipments
Gedung dan Bangunan	215,738,104,473	293,810,379,419	245,363,086,651	264,185,397,241	Buildings and Properties
Jalan, Irigasi dan Jaringan	187,410,056,319	43,643,190,251	27,723,214,427	203,330,032,143	Road, Irrigation and Network
Aset Tetap Lainnya	366,349,967	36,169,188	-	402,519,155	Other Fixed Assets
	1,711,114,641,116	555,070,042,697	295,754,298,252	1,970,430,385,561	
Nilai Buku Bersih	4,642,866,745,272			4,568,525,966,643	Net Book Value

Terdapat selisih sebesar Rp3.924.263.320.959 antara SAIBA dan SIMAK karena Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) terhadap Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Irigasi yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015 berdasarkan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Pada BPK revaluasi BMN dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada Tahun 2017 dan 2018 terhadap Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.992.187.484.073.

Hasil revaluasi BMN tersebut tidak disajikan dalam *face* Laporan Keuangan BPK Tahun 2018 karena temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (LKPP) menyatakan nilai revaluasi LKKL belum menyajikan angka aset yang seharusnya.

There is a difference of Rp3,924,263,320,959 between SAIBA and SIMAK because the Government revalued State Property (State of Goods) in the form of Land, Building and Properties, Road and Irrigation obtained until December 31, 2015 based on Presidential Regulation No. 75 Year 2017 on the revaluation of State/Local Property and Regulation of the Minister of Finance No. 118/PMK.06/2017 on Guidelines for the Implementation of the Return Assessment of State Property. In BPK State of Goods revaluation implemented by Directorate General of State Assets (DJKN) in Year 2017 and 2018 to Land, Building and Properties, Road, Irrigation and Network of Rp3,992,187,484,073.

The State of Goods revaluation result is not presented in the *face* of BPK's Financial Report of 2018 because BPK's finding on

16. Piutang Jangka Panjang

16. Long - Term Receivable

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Piutang Tagihan TP/TGR	3,196,262,033	2,908,215,990	Receivables of Indemnification of Treasury/Claims Bills
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	(2,696,178,366)	(2,523,276,509)	Allowance for Doubtful Accounts - Indemnification of Treasury/Claims Bills
Jumlah	500,083,667	384,939,481	Total

Piutang Jangka Panjang merupakan piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Long - Term Receivables represent receivables that will mature or will be realized more than 12 months from the date of reporting.

17. Aset Lainnya

17. Other Assets

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Aset Tak Berwujud	176,965,980,064	186,848,003,424	Intangible Assets
Aset Lain-Lain	61,551,373,767	21,421,653,287	Other Assets
Amortisasi	(169,433,653,980)	(113,443,225,392)	Amortization
Jumlah	69,083,699,851	94,826,431,319	Total

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Other Assets are assets that can not be grouped either into Current Assets or Fixed Assets.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

18. Kewajiban Jangka Pendek

18. Short - Term Liabilities

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Utang Kepada Pihak Ketiga	62,537,868,997	60,986,545,027	Account Payable - Third Parties
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	51,000,000	50,000,000	Excess Payment Receivable Payable
Pendapatan diterima dimuka	952,515,553	1,075,292,762	Unearned Revenue
Utang Jangka Pendek Lainnya	1,286,850	43,936,941	Others short term-Liabilities
Jumlah - Bersih	63,542,671,400	62,155,774,730	Total - Net

Kewajiban Jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Short-term Liabilities constitute a group of liabilities that are expected to be completed in less than 12 (twelve) months after the date of reporting.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Debt to Third Parties is an accrued expense and an obligation that must be settled immediately to other third parties in less than 12 (twelve) months.

Utang kelebihan pembayaran pendapatan terjadi ketika jumlah pendapatan yang disetorkan lebih besar dari yang seharusnya. Oleh karena sampai akhir periode pelaporan pengembalian kelebihan pendapatan belum dapat direalisasikan maka satuan kerja mencatat sebagai utang kelebihan pembayaran.

Debt overpayment of income occurs when the amount of income that is deposited is greater than it should be. Because of until the end of the reporting period the return of excess income has not been realized then the working unit record as overpayment debt.

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Negara, namun Barang/Jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK.

Unearned income is income already paid to the Treasury Fund, but the Goods/Services have not been delivered to third parties in the framework of Non-Tax Income.

Uang Muka Dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Advance From The Office of State Treasury Service is a money supply (UP) or additional money supply (TUP) is granted by The Office of State Treasury Service as advances of work still in or controlled by the Expenditure Treasurer at the date of reporting.

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan potongan pajak yang dipotong Bendahara Pengeluaran dan belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2018.

Other Short-Term Liability are tax deductions withheld by the Expenditure Treasurer and have not been deposited to the Treasury Fund as of December 31, 2018.

19. Ekuitas

19. Equity

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp4.600.032.344.580 dan Rp4.625.654.474.532.

Equity Balance as of December 31, 2018 and 2017 each of them amounting to Rp4,600,032,344,580 and Rp4,625,654,474,532.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Equity is the net worth of an entity which is the difference between assets and liabilities. More details on equity are presented in the Statement of Changes in Equity.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

20. Pendapatan**20. Revenues**

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	857,467,624	1,819,486,356	Rental Land, Properties, and Building Revenue
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	909,801,029	-	
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi Pelatihan dan Teknologi	-	4,047,490,000	Service, Employment, Information, Training and Technology Revenue
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	5,104,320,000	-	
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	535,626	349,807	Financial Institution Service Revenue (Current Account)
Pendapatan Jasa Lainnya	3,828,156,585	3,525,159,603	Other Service Revenue
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	149,250,625	176,620,816	Income of Fines Delayed Completion of Government
Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka Gaji	33,986,048	31,911,142	Reception Persekot/ Advance Salary
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	165,450	Other Budget Revenues
Jumlah - Bersih	10,883,517,537	9,601,183,174	Total - Net

Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp10.883.517.537 dan Rp9.601.183.174, terjadi kenaikan sebesar Rp1.282.334.363 atau 13,36%. Keseluruhan Pendapatan Operasional merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Operating Revenue for the periods ended December 31, 2018 and 2017 amounted Rp10,883,517,537 and Rp9,601,183,174 respectively, increased by Rp1,282,334,363 or 13.36%. Overall Operating Income is Non-Tax State Revenue.

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 seluruhnya berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.

Non-Tax State Revenue for the period ended December 31, 2018 and 2017 is entirely derived from Other Non-Tax State Revenues.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya adalah pendapatan negara yang bukan merupakan pendapatan dari pajak ataupun pendapatan hibah dan bukan bagian dari pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam maupun pendapatan bagian pemerintah atas laba.

Non-Tax State Revenues Others are state revenues that are not derived from taxes or grant revenues and are not part of revenues arising from the utilization of natural resources or the government's share of earnings.

21. Beban Pegawai**21. Employee Expenses**

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Beban Gaji	285,545,939,320	274,943,868,091	Salary Expenses
Beban Tunjangan-Tunjangan	112,442,974,353	103,977,881,628	Benefits Expenses
Beban Lembur	8,170,549,800	7,289,251,237	Overtime Loans
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	1,492,445,891,667	749,692,887,651	Special Benefit Expenses and Employee Expenses Transito
Jumlah - Bersih	1,898,605,355,140	1,135,903,888,607	Total - Net

22. Beban Persediaan**22. Inventory Expenses**

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Beban Persediaan Konsumsi	36,753,595,350	39,040,049,040	Consumption Supply Expense
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan legi	-	85,051,000	Duty, Stamps and Certification Fee Expense
Beban Persediaan Lainnya	6,172,732,506	5,760,061,673	Other Supply Expense
Jumlah - Bersih	42,926,327,856	44,885,161,713	Total - Net

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

23. Beban Barang dan Jasa

23. Good and Service Expenses

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Beban Barang			Operational Goods
Beban Barang Operasional	184,831,549,358	178,003,581,466	Operational Goods Expense
Beban Barang Non Operasional	214,873,754,919	215,693,311,239	Non Operational Goods Expense
Beban Jasa			Services Expenses
Beban Langganan Daya dan Jasa	60,481,627,024	59,265,624,823	Power Subscriptions Services Expense
Beban Jasa Pos dan Giro	-	65,138,883	Postal and Giro Services Expenses
Beban Jasa Konsultan	10,737,356,200	4,957,229,700	Consultant Services Expense
Beban Sewa	11,293,125,555	13,041,597,605	Rent Expense
Beban Jasa Profesi	42,244,016,550	30,940,061,392	Professional services Expense
Beban Jasa Lainnya	33,946,099,001	22,555,283,529	Other Services Expense
Beban Aset Ekstrakomtabel			Asset Expenses Extracompatible
Peralatan dan Mesin	854,818,211	8,222,090	Equipment and Machinery
Jumlah	559,262,346,818	524,530,050,727	Total

24. Beban Pemeliharaan

24. Maintenance Expenses

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	65,695,373,198	63,407,690,483	Building and properties Maintenance Expenses
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	8,752,434,561	9,047,223,599	Other building and properties Maintenance Expenses
Beban pemeliharaan Peralatan dan Mesin	39,221,335,473	34,079,722,897	Equipment and machinery Maintenance Expenses
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,025,212,554	3,222,897,625	Other Equipment and machinery Maintenance Expenses
Beban Pemeliharaan Jaringan	1,391,434,020	1,222,770,359	Network Maintenance Expenses
Beban Pemeliharaan Lainnya	130,492,590	415,040,000	Other Maintenance Expenses
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3,423,549,211	3,763,237,693	Raw material Inventory Expenses
Beban Persediaan Suku Cadang	777,325,596	746,554,009	Spare parts Inventory Expenses
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	20,340,000	100,974,800	Asset Expenses Extracompatible Building and Properties
Jumlah	122,437,497,203	116,006,111,465	Total

25. Beban Perjalanan Dinas

25. Official Travel Expenses

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Beban Perjalanan Biasa	584,895,201,444	550,370,253,426	Common Travel Expenses
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	42,627,679,856	39,841,724,756	Official Travel in Town Expenses
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	55,034,879,291	59,877,812,601	Official Travel Meeting Package in Town Expenses
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	25,338,616,249	21,143,967,477	Official Travel Meeting Package out Town Expenses
Beban Perjalanan Biasa- Luar Negeri	50,542,688,484	35,791,326,417	Overseas Common Travel Expenses
Jumlah	758,439,065,324	707,025,084,677	Total

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

26. Beban Penyusutan dan Amortisasi

26. Depreciations and Amortizations Expenses

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	195,764,570,425	217,419,190,816	Equipment and machinery Depreciation Expenses
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	53,834,419,446	48,701,466,196	Building and properties Depreciation Expenses
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	14,515,609,744	16,032,559,487	Road, irrigation and network Depreciation Expenses
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	79,896,626	36,169,188	Other assets Depreciation Expenses
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	172,040,052	190,238,920	Unused assets in operation Depreciation Expenses
Beban Amortisasi Software	8,018,215,118	6,578,422,771	Road, irrigation and network Depreciation Expenses
Beban Amortisasi Lisensi	6,657,581,641	5,098,514,974	Other assets Depreciation Expenses
Beban Amortisasi ATB yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	289,692,488	32,515,944	Unused assets in operation Depreciation Expenses
Jumlah	279,332,025,540	294,089,078,296	Total

27. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

27. Allowance for Bad Debt Expenses

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang jangka Pendek			Allowance for Bad Debt Expenses - Short Term Receivable
- Piutang jangka Pendek	54,144,823	18,465,366	Short Term Receivable -
- Bagian Lancar TP/TGR	323,903	10,693,518	Current Position - Indemnification of Treasury/Claims Bills
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	172,901,857	20,614,177	Allowance for Bad Debt Expenses - Long Term Receivable
Jumlah	227,370,583	49,773,061	Total

28. Kegiatan Non Operasional

28. Non Operational Activities

	31 Desember/December 31,		
	2018	2017	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(661,145,548)	166,730,126	Surplus (Deficit) Release of Non Current Assets
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	2,226,058,525	2,050,245,872	Gain on Disposal of noncurrent Assets
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	2,887,204,073	1,883,515,746	Loss on Disposal of noncurrent Assets
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	878,885,090	1,216,163,233	Surplus/Deficit of Other non operation activities
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional	1,576,398,123	2,461,334,767	Gain on Other non operation activities
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lain	697,513,033	1,245,171,534	Loss on Other non operation activities
Jumlah	217,739,542	1,382,893,359	Total

29. Laporan Perubahan Ekuitas

29. Statement of Changes in Equity

- Nilai Ekuitas Awal** merupakan Nilai Ekuitas yang berasal dari nilai Ekuitas akhir tahun yang lalu. Nilai Ekuitas Awal per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp4.625.654.474.532 dan Rp4.647.887.059.586.
- Defisit LO** merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Defisit LO per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar (Rp3.650.128.731.385) dan (Rp2.811.505.072.013).

- Beginning Balance of Equity** represents the Equity Value derived from the value of the Equity at the end of the previous year. The Beginning Balance of Equity as of December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp4,625,654,474,532 and Rp4,647,887,059,586.
- LO deficit** represents a lesser difference between surplus/deficit operational activities, surplus/deficit non-operational activities, and extraordinary items. The LO Deficit as of December 31, 2018 and 2017 amounted to (Rp3,650,128,731,385) and (Rp2,811,505,072,013).

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

29. Laporan Perubahan Ekuitas (Lanjutan)

29. Statement of Changes in Equity (Continued)

- c. **Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar** merupakan Penyesuaian Nilai Aset, Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi serta Koreksi Lain-lain yang dilakukan pada periode berjalan terhadap nilai ekuitas dari akun-akun Aset pada tahun lalu.

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

- Koreksi Nilai Persediaan

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Barang Konsumsi	1,704,000	-
Jumlah	1,704,000	-

Consumption Goods
Total

- Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	102,765,992,410	67,005,365,666
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(20,226,987,318)	(44,309,375)
Jumlah	82,539,005,092	66,961,056,291

Correction Value Asset Non Revaluation
 Correction Value Other Asset Non Revaluation
Total

- Koreksi Lain-Lain

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Koreksi Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	2,573,452,702	1,642,587,625
Koreksi Piutang	85,682,977	(104,639)
Koreksi Kewajiban	(133,727,976)	(17,787,568)
Koreksi Pendapatan	414,052,264	2,833,344,864
Koreksi Beban	(165,220,835)	55,144,241,435
Jumlah	2,774,239,132	59,602,281,717

Other Cash Corrections in Treasurer
 Receivable Correction
 Liability Correction
 Revenue Correction
 Expenses Correction
Total

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan	85,314,948,224	126,563,338,008
--	-----------------------	------------------------

Total of Cumulative Impact of Changes in Policies/Fundamental Errors

- d. **Transaksi Antar Entitas** merupakan selisih antara akun Ditagihkan ke Entitas Lain dan Diterima dari Entitas Lain ditambah dengan selisih antara akun Transfer Keluar dan Transfer Masuk, serta ditambah dengan Pengesahan Hibah Langsung. Rincian Transaksi antar entitas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2018	2017
Ditagihkan ke Entitas Lain	3,543,596,769,013	2,670,558,146,116
Diterima dari Entitas Lain	(22,776,536,895)	(20,126,781,218)
Transfer Keluar	(50,092,679,963)	(479,706,514,473)
Transfer Masuk	50,135,279,963	479,706,514,473
Pengesahan Hibah Langsung	18,328,821,091	12,277,784,053
Jumlah	3,539,191,653,209	2,662,709,148,951

Other Cash Corrections in Treasurer
 Receivable Correction
 Liability Correction
 Revenue Correction
 Expenses Correction
Total

- d. **Inter-Entity Transactions** represent the difference between accounts billed to other entities and received from other entities plus the difference between Transfer Out and Incoming Transfer accounts, plus the Validation of Direct Grants. Details Transactions between entities as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

29. Laporan Perubahan Ekuitas (Lanjutan)

- e. **Kenaikan/Penurunan Ekuitas** merupakan Surplus/(Defisit) LO ditambah dengan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dan Transaksi Antar Entitas. Kenaikan/Penurunan Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar (Rp25.622.129.952) dan (Rp22.232.585.054).
- f. **Nilai Ekuitas Akhir** merupakan Nilai Ekuitas Awal ditambah dengan Kenaikan/Penurunan Ekuitas (a + e) yaitu per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp4.600.032.344.580 dan Rp4.625.654.474.532.

30. Informasi Penting Lainnya

- a. *Government Partnership Fund (GPF) Tahap II*
Sejak tahun 2006 BPK RI melakukan kerjasama dengan *Australian National Audit Office (ANAO)* yang didanai oleh Pemerintah Australia (AusAID) dalam bentuk Hibah melalui *Government Partnership Fund (GPF) Tahap II*. Hibah AusAID - GPF 2 telah dilaporkan dengan Nomor Register 71012601 menggunakan *Record of Understanding (RoU) 38710* yang ditandatangani pada tanggal 30 Agustus 2006.

Selama TA 2017 terdapat realisasi kegiatan hibah yang didanai dari pihak *Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)* Australia dan telah di-BAST-kan Hibah Bentuk Jasa dengan nominal AUD1,016,113.65 atau sama dengan Rp10.727.401.395,44 dengan Nomor 51/BAST/X.4/05/2018 Tanggal 31 Mei 2018. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan BAST adalah sebagai berikut:

1. Jasa satu orang *Deployment Senior Officer* ANAO di Kantor BPK RI sebagai *Subject Matter Expert (SME)* Bidang Pemeriksaan Kinerja;
2. Kegiatan kunjungan di Kantor Perwakilan BPK;
3. *Workshop* Pemeriksaan Kinerja di Kantor Perwakilan BPK;
4. *Workshop* Evaluasi dan Perencanaan di Jakarta;
5. *Senior Management Dialogue* topik Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
6. *Senior Management Dialogue* topik *Quality Assurance* di Australia;
7. *ACAG-Performance Audit Training* di Canberra, Australia;
8. *Workshop* dengan topik *Contracting In Management* di Jakarta;
9. *Secondment* /Magang Pemeriksaan Keuangan di AO NSW;
10. *Secondment* /Magang *Quality Assurance* di ANAO, Canberra;
11. *Organisational Development-Talent Pool* di Australia;
12. Biaya administrasi dan manajemen ANAO.

29. Statement of Changes in Equity (Continued)

- e. **Surplus/(Deficit) of Equity** are Surplus/(Deficit) SO with Cumulative Impact of Changes in Policy/Fundamental Errors and Inter-Entity Transactions. Surplus/(Deficit) of Equity as of December 31, 2018 and 2017 amounting to (Rp25,622,129,952) and (Rp22,232,585,054).
- f. **Ending Balance of Equity** are Beginning Balance and Surplus/(Deficit) of Equity (a + e) as of December 31, 2018 and 2017 amounting to Rp4,600,032,344,580 and Rp4,625,654,474,532, respectively.

30. Other Significant Informations

- a. *Government Partnership Fund (GPF) Phase II*
Since 2006 BPK RI has collaborated with the Australian National Audit Office (ANAO) funded by the Australian Government (AusAID) in the form of Grants through Phase II Government Partnership Fund (GPF). The AusAID Grant - GPF 2 has been reported with Register Number 71012601 using a Record of Understanding (RoU) 38710 signed on August 30, 2006.

During FY 2017 there was a realization of a grant activity funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) and a Form of Service Grant BAST with nominal AUD1,016,113.65 or equal to Rp10,727,401,395.44 with Number 51/BAST/X.4/05/2018 May 31, 2018. The activities carried out by BAST are as follows:

1. Services for one ANAO Deployment Senior Officer at the BPK RI Office as a Subject Matter Expert (SME) in the Performance Inspection Field;
2. Visiting activities at the BPK Representative Office;
3. Performance Inspection Workshop at the BPK Representative Office;
4. Workshop on Evaluation and Planning in Jakarta;
5. Senior Management Dialogue on Financial Auditing topics in Jakarta;
6. Senior Management Dialogue topik *Quality Assurance* di Australia;
7. *ACAG-Performance Audit Training* in Canberra, Australia;
8. Workshop on the topic of *Contracting In Management* in Jakarta;
9. *Secondment/Financial Examination Internship* in AO NSW;
10. *Secondment/Quality Assurance Internship* of ANAO, Canberra;
11. *Organizational Development-Talent Pool* in Australia;
12. ANAO administration and management fees.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

30. Informasi Penting Lainnya (Lanjutan)

Atas hibah tersebut telah dilakukan pengesahan di KPPN VII Jakarta. Program GPF Tahap II berakhir pada Desember 2017. Program kerja sama Indonesia dengan Australia dalam bidang tata kelola ekonomi dan penguatan institusi akan dilanjutkan dalam Program Kerja Sama Indonesia Australia untuk Perekonomian (PROSPERA), dimana BPK sebagai salah satu penerima manfaatnya.

b. *Australia Indonesia Partnership for Economic Development (AIECO) atau PROSPERA*

Pada tahun 2018 BPK RI melakukan kerjasama dengan *Australian National Audit Office (ANAO)* yang didanai oleh Pemerintah Australia (*AusAID*) dalam bentuk Hibah melalui *Australia Indonesia Partnership for Economic Development (AIECO)* atau dalam Indonesia disebut Program PROSPERA.

Hibah PROSPERA mempunyai Nomor Register 23TSV7CA berdasar *Subsidiary Arrangement* antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 4 Desember 2017.

Selama Semester I TA 2018 terdapat realisasi kegiatan hibah yang didanai dari pihak DFAT dan telah di-BAST-kan Hibah Bentuk Jasa dengan nominal AUD709,497.34 atau sama dengan Rp7.601.419.696,27 dengan Nomor 04/BAST/X.4/08/2018 Tanggal 21 Agustus 2018. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan BAST adalah sebagai berikut:

1. Jasa satu orang *Development Senior Officer* ANAO di Kantor BPK RI sebagai *Subject Matter Expert (SME)* Bidang Pemeriksaan Kinerja;
2. Kegiatan kunjungan di Kantor Perwakilan BPK;
3. *ACAG-Performance Audit Training* di Canberra, Australia;
4. *Senior Management Dialogue* topik Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
5. *Workshop* dengan topik *Contracting In/Out Management* di Jakarta;
6. *Secondment /Magang* Pemeriksaan Keuangan di AO NSW, Sydney, Australia;
7. *Short Term Secondment on Quality Assurance* di Canberra;
8. *Senior Management Dialogue* topik *Quality Assurance* di Jakarta;
9. *Organisational Development*;
10. *Program Review and Planning* di Jakarta, Indonesia;
11. *High Level Visit* di Bandung, Indonesia;
12. *Impact Conference on Performance Audit* di Sydney, Australia;
13. Biaya administrasi dan manajemen di ANAO.

Atas hibah tersebut telah dilakukan pengesahan di KPPN VII Jakarta.

30. Other Significant Informations (Continued)

Approval has been made on the grant at KPPN VII Jakarta. The GPF Phase II program ends in December 2017. The program of cooperation between Indonesia and Australia in the field of economic governance and institutional strengthening will be continued in the Australia Indonesia Cooperation Program for the Economy (PROSPERA), where the BPK is one of the beneficiaries.

b. *Australia Indonesia Partnership for Economic Development (AIECO) or PROSPERA*

In 2018 BPK RI collaborated with the Australian National Audit Office (ANAO) funded by the Australian Government (AusAID) in the form of Grants through the Australia Indonesia Partnership for Economic Development (AIECO) or in Indonesia called the PROSPERA Program.

PROSPERA grants have a 23TSV7CA Register Number based on a Subsidiary Arrangement between the Australian Government and the Indonesian Government signed on December 4, 2017.

During the first semester of 2018 there was a realization of grant activities funded by DFAT and the form of service grants with nominal value of AUD709,497.34 or equal to Rp7,601,419,696.27 with Number 04/BAST/X.4/08/2018 August 21, 2018. The activities carried out by BAST are as follows:

1. *Services of one ANAO Development Senior Officer at the BPK RI Office as a Subject Matter Expert (SME) in the Field of Performance Inspection;*
2. *Visiting activities at the BPK Representative Office;*
3. *ACAG-Performance Audit Training in Canberra, Australia;*
4. *Senior Management Dialogue on Financial Auditing topics in Jakarta;*
5. *Workshop on the topic of Contracting In/Out Management in Jakarta;*
6. *Secondment/Financial Examination Internship in AO NSW, Sydney, Australia;*
7. *Short Term Secondment on Quality Assurance in Canberra;*
8. *Senior Management Dialogue on Quality Assurance topics in Jakarta;*
9. *Organizational Development;*
10. *Review and Planning Program in Jakarta, Indonesia;*
11. *High Level Visit in Bandung, Indonesia;*
12. *Impact Conference on Performance Audit in Sydney, Australia;*
13. *Administration and management fees at ANAO.*

The grant has been confirmed by KPPN VII Jakarta.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

31. Pengungkapan Penting Lainnya

1) Pengungkapan Lain-Lain

Berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam SK BPK No. 3/K/I-XIII.2/7/2014 sebagaimana telah diubah dengan perubahan ke empat SK BPK No. 14/K/I-XIII.2/9/2017 terdapat perubahan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Unit Eselon II berubah menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara Unit Eselon I. Balai Diklat Unit Eselon III berubah menjadi Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara Unit Eselon III (Balai Diklat PKN Medan, Yogyakarta dan Gowa).

2) Rekening Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga diharuskan mengungkapkan rekening yang digunakan dalam kegiatan operasionalnya. Per 31 Desember 2018 BPK memiliki 41 rekening bendahara pengeluaran dan satu rekening bendahara penerimaan.

3) Peristiwa Kebakaran di Perwakilan Sulawesi Barat

Pada tanggal 19 April 2019 telah terjadi kebakaran di sebagian ruang lantai 3 Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan pengamatan fisik oleh Tim Pemeriksa yang didampingi oleh Staf pengelola BMN BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dan Dokumen Surat Keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Mamuju Nomor NO.POL: SKET/09/IV/2019/RESKRIM tanggal 19 April 2019 kejadian ini telah mengakibatkan aset peralatan dan mesin mengalami rusak berat akibat kebakaran dan air dari pemadam kebakaran dengan nilai perolehan Rp19.691.117.527 dan nilai buku sebesar Rp1.335.000.

Atas kejadian tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah mengusulkan ke Sekretaris Jenderal BPK RI dengan Surat No. 124/ND/XIX.MAM/4/2019 untuk penghapusan aset peralatan dan mesin dengan nilai buku Rp1.335.000,00.

4) Kerusakan Infrastruktur di Area Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Papua

Terdapat beberapa kerusakan infrastruktur di area gedung kantor BPK Perwakilan Provinsi Papua yang meliputi Mushalla senilai Rp1.212.401.000 sudah miring dan terjadi keretakan pada lantai bangunan, pagar samping gedung kantor mengalami longsor dan tempat parkir mengalami keretakan.

31. Other Important Disclosures

1) Other Disclosures

Based on the organizational structure contained in the BPK Decree No. 3/K/I-XIII.2/7/2014 as amended by changes to the four BPK Decrees No. 14/K/I-XIII.2/9/2017 there are changes in the Organization and Implementing Procedures. The Echelon II Education and Training Center Unit turned into the Echelon Unit I State Audit and Education Education and Training Agency. The Echelon III Training Center changed to the Echelon III Unit State Audit and Education Training Center (Medan PKN Training Center, Yogyakarta and Gowa).

2) Government Accounts

Based on Regulation of the Minister of Finance No. 177/PMK.05/2015 as amended by Regulation of the Minister of Finance No. 222/PMK.05/2016 on Amendment to Regulation of the Minister of Finance No. 177/PMK.05/2015 on Guidelines for the Preparation and Submission of Financial Statements of State Ministries/Institution is required to disclose accounts used in its operational activities. As of December 31, 2018 the BPK has 41 treasury expenditure accounts and one receipt treasurer account.

3) Fire events in West Sulawesi Representatives

On April 19, 2019 there has been a fire in a part of the 3rd floor room of the BPK Representative Office of West Sulawesi Province. Based on physical observations by the Examination Team accompanied by the BPK BPN Representative of West Sulawesi Provincial Management Staff and Documents from the Indonesian National Police Mamuju Resort Number NO. POL: SKET/09/IV/2019/RESKRIM dated April 19, 2019 this incident has resulted in equipment and machinery assets were severely damaged by fire and water from firefighters with the acquisition value of Rp19,691,117,527 and book value of Rp1,335,000.

For this incident, the BPK Representative of West Sulawesi Province has proposed to the Secretary General of the Republic of Indonesia BPK with Letter No. 124/ND/XIX.MAM/4/2019 for the removal of equipment and machine assets with book value Rp1,335,000.00.

4) Infrastructure Damage in the Office Building Area of Papua Representative

There was some damage to infrastructure in the area of the BPK Representative Office of the Papua Province which included a Mushalla worth Rp1,212,401,000 already inclined and a rift occurred on the floor of the building, side fences of office buildings had landslides and parking spaces were fractured.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2018 and 2017
(Expressed in Rupiah)

31. Pengungkapan Penting Lainnya (Lanjutan)

Berdasarkan hasil survey dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Jayapura sesuai Surat Nomor: 600/507/2019 tanggal 4 Pebruari 2019 dan Surat Nomor: 600/1191/2019 tanggal 21 Maret 2019 berkesimpulan bahwa area Kantor BPK Perwakilan Provinsi Papua terletak di atas tanah yang kurang stabil dan rawan geser karena adanya aliran air tanah yang bergerak di bawah lokasi tersebut.

32. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen BPK RI bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang telah diselesaikan pada tanggal 10 Mei 2019.

31. Other Important Disclosures (Continued)

Based on the survey results from the Public Works Agency for Spatial Planning, Housing and Settlement of Jayapura City in accordance with Letter Number: 600/507/2019 dated February 4, 2019 and Letter Number: 600/1191/2019 dated March 21, 2019 it was concluded that the BPK Representative Office area of the Papua Province was located on land that was less stable and prone to shear due to the flow ground water that moves below that location.

32. Completion of Financial Statements

The Management of BPK RI is responsible for the preparation of the financial statements that were completed on May 10, 2019.